

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RENJA TAHUN 2020

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

TAHUN 2019

DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Latar Belakang.....	1
1.2.	Landasan Hukum.....	3
1.3.	Maksud dan Tujuan	6
1.4.	Sistematika Penulisan.....	7
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKD TAHUN 2017	11
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra	11
2.1.1	Gambaran Umum Kinerja OPD	11
2.1.2	Evaluasi Capaian dan Evaluasi Program/ Kegiatan Tahun 2017	12
2.1.3	Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017	15
2.1.4	Review Hasil Evalluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018	21
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan OPD	36
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD	38
2.4.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	54
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	67
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	67
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	69
3.3	Program dan Kegiatan	73
BAB VII	PENUTUP.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD 2018.....	22
Lampiran 2	Capian Kinerja Pelayanan BPKD Tahun 2016-2021.....	37
Lampiran 3	Tabel Perda.....	43

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan *Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman* menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2020.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga teknis di bidang perencanaan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATAEN PADANG PARIAMAN

H. H A N I B A L, SE. MM
NIP. 19610217 198903 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja BPKD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2020.

Renja BPKD Tahun 2020 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja BPKD Tahun 2020 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021. Dengan demikian, Renja BPKD Tahun 2020 adalah salah satu bahan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Oleh Sebab itu karena Tahun 2020 adalah Tahun ke empat pelaksanaan RPJMD 2016-2021, maka untuk menyusun RKPD dan Renja OPD kita mempedomani :

- 1) RPJPN Tahun 2005-2025,
- 2) RPJMN Tahun 2014-2020,
- 3) RPJPD Propinsi Sumbar 2005-2025,
- 4) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025,
- 5) RPJMD Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja BPKD tahun 2020 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra BPKD tahun keempat. Sebagai perangkat

daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang urusan Pengelolaan Keuangan Daerah dan memiliki fungsi :

1. penyusunan perencanaan bidang Keuangan;
2. perumusan kebijakan teknis dibidang Keuangan;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Keuangan;
4. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Keuangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran BPKD Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Permendagri 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
17. Permendagri 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2015;
18. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;

22. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017;
23. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKD disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja BPKD adalah :

1. Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan BPKD.
2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan BPKD sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
3. Menyelaraskan program dan kegiatan BPKD dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD Kabupaten Padang Pariaman.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Renja BPKD disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

2.1.1 Gambaran Umum Kinerja OPD

2.1.2 Evaluasi Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2018

2.1.3 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018

2.1.4 Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra OPD

2.1.1 Gambaran Umum Kinerja OPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, BPKD Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang Pengelola Keuangan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman serta melihat Visi Bupati Padang Pariaman, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera”**, maka Misi yang diemban pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah **“Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik”**.

Pelaksanaan kegiatan BPKD Tahun 2018 secara umum selaras dengan Renja BPKD 2018. Pelaksanaan program dan kegiatan BPKD Tahun 2017 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun 2018. Renja BPKD pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019 dan perkiraan capaian target tahun 2020.

2.1.2 Evaluasi Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2018

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 dan DPA Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman selaku OPD memperoleh target pendapatan Asli Daerah Rp. 92.086.252.632,30 dengan realisasi Rp. 61.591.527.433,02 atau sebesar 66,88% dan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 14.200.098.844,79 dengan realisasi belanja secara keseluruhan hanya sebesar Rp. 13.782.730.151,00 atau sebesar 99,06%, dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.076.525.767,00 dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 4.884.275.907,00 atau sebesar 96,21%, anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.123.573.077,79 dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.898.454.244,00 atau sebesar 97,53%.

Hasil Renja BPKD Tahun 2018 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi out put yang diharapkan.

Tabel 2.1

Capaian dan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2018

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.263.947.000	1.245.768.443	98,56
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	219.200.000	218.560.370	99,71
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.400.000	166.745.215	95,07
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /operasional	8.500.000	6.716.250	79,01

4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	258.420.000	257.540.000	99,66
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	48.900.000	48.898.800	100,00
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	7.990.400	99,88
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000	11.460.000	95,50
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	21.400.000	21.382.000	99,92
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	103.500.000	103.103.216	99,62
10	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran*)	408.627.000	403.372.162	98,71
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	396.752.500	390.872.662	98,52
11	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	246.050.000	245.751.000	99,88
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	19.500.000	19.491.000	99,95
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	105.000.000	99.428.162	94,69
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	26.202.500	26.202.500	100,00
C.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.109.000	29.647.915	98,47
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	30.109.000	29.647.915	98,47
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	297.610.575	294.349.255	98,90
16	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.579.750	71.186.803	99,45
17	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	16.695.800	16.555.800	99,16
18	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	153.635.025	153.061.077	99,63
19	Penyaluran Bantuan Keuangan SKPKD	46.750.000	44.663.575	95,54
20	Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD	8.950.000	8.882.000	99,24
E.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.872.806.692	2.745.412.921	95,57
21	Penerbitan SPPTPBB dan DHKP	33.850.000	33.365.250	98,57
22	Operasional Pendataan Pajak dan Retribusi	77.100.000	74.365.000	96,45
23	Persiapan Pelaksanaan Penganggaran E-Budgeting	21.850.000	18.786.500	85,98
24	Penatausahaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	20.450.000	19.720.000	96,43

25	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja (SP2B) Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	14.140.000	12.395.500	87,66
26	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja (SP2B) Bantuan Operasional sekolah (BOS)	15.150.000	13.000.000	85,81
27	Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	10.000.000	9.695.000	96,95
28	Penatausahaan Kas Daerah	30.300.000	28.998.956	95,71
29	Implementasi Aplikasi SIMGAJI ke OPD	41.700.000	39.199.441	94,00
30	Pemutakhiran Data Pajak	123.650.000	119.483.500	96,63
31	Penata Usahaan Gaji dan Tunjangan PNSD	47.345.000	45.258.862	95,59
32	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Restribusi	7.900.000	5.741.500	72,68
33	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	623.000.000	620.420.000	99,59
34	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	32.400.000	17.719.000	54,69
35	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	39.500.000	35.118.750	88,91
36	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	46.333.000	42.986.200	92,78
37	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	40.725.000	40.500.750	99,45
38	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	46.270.200	46.252.275	99,96
39	Penunjang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda)	18.700.000	18.409.150	98,44
40	Penyusunan Laporan Semesteran Aset/ Barang Daerah	87.100.000	86.198.000	98,96
41	Pelaksanaan Penerbitan SP2D	64.005.000	62.694.029	97,95
42	Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah	67.250.000	65.571.800	97,50
43	TP-TGR	10.050.000	9.836.952	75,38
44	Implementasi Simda Barang Milik Daerah	42.550.000	42.067.250	98,87
45	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	62.557.600	50.262.425	80,35
46	Fasilitas Penerbitan DPA dan SPD	20.800.000	18.714.000	89,97
47	Kodefikasi dan Pengekingan Aset	26.400.000	26.341.250	99,78
48	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD untuk BPK dan bendaharawan	47.142.400	46.032.550	97,65
49	Implementasi Aplikasi Persediaan	16.740.000	16.648.000	99,45

50	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	35.700.000	35.610.934	99,75
51	Penyusunan Standar Biaya dan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD	30.500.000	17.551.000	57,54
52	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	37.600.000	36.407.000	96,83
53	Sosialisasi PBB dan BPHTB	76.817.000	76.817.000	100,00
54	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD	53.800.000	50.602.100	94,06
55	Sosialisasi Cukai Tembakau	227.312.517	197.781.000	87,01
56	Operasional Pemungutan PAD	477.000.000	476.958.134	99,99
57	Pengalihan Potensi PAD	21.767.000	20.280.000	93,17
58	Klinik Akuntansi /Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD	12.101.975	12.098.375	99,97
59	Verifikasi Piutang PBB	118.250.000	113.123.414	95,66
60	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	20.250.000	18.749.434	92,59
61	Penatausahaan Belanja Langsung	23.750.000	23.652.640	99,59
F.	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	45.300.000	45.298.000	100,00
62	Pengelolaan Dana Transfer, Dana Perimbangan dan Bagi hasil	45.300.000	45.298.000	100,00
G.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	170.000.000	132.926.711	78,19
63	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	85.000.000	62.293.000	73,29
64	Penyusunan KUA dan PPAS	85.000.000	70.633.711	83,10
Jumlah		5.076.525.767	4.884.275.907	96,21

2.1.3 Pelaksanaan Program dan Kegiatan 2018

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Padang Pariaman memiliki Tujuh (7) Program dan Enam Puluh Empat (64) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri atas 10 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp 1.263.947.000,00** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp 1.245.768.443,00** atau **98,56%**. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi keuangan pada 10 kegiatan dibawah ini kurang dari 100% karena adanya beberapa faktor penyebab di lapangan dan efisiensi penggunaan dana.

Tabel 2.2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	1 Tahun	219.200.000	218.560.370	99,71
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	175.400.000	166.745.215	95,07
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 kl/Tahun	8.500.000	6.716.250	79,01
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bln / Tahun untuk 42 Org	258.420.000	257.540.000	99,66
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	a. 1 Tahun, b. 1 Gedung	48.900.000	48.898.800	100,00
6	Penyediaan komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	8.000.000	7.990.400	99,88
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	10 Exsplar	12.000.000	11.460.000	95,50
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun	21.400.000	21.382.000	99,92
9	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	1 Tahun	103.500.000	103.103.216	99,62
10	Penyediaan jasa Pendukung Adm Perkantoran	12 Bln/ Tahun 18 Orang	408.627.000	403.372.162	98,71
JUMLAH			1.263.947.000	1.245.768.443	98,56

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdiri atas 4 Kegiatan dengan indikator capaian program berupa peningkatan pelayanan aparatur, indikator masukan yaitu dana total **Rp. 396.752.500,00** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp. 390.872.662,00** atau **98,52%** Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi keuangan pada 4

kegiatan dibawah ini kurang dari 100% karena adanya efisiensi dalam penggunaan dana, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No	KEGIATAN	TARGET KINERJA A	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pengadaan Peralatan Gdg Kantor	1 gedung	246.050.000	245.751.000	99,88
2	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	1 gebung	19.500.000	19.491.000	99,95
3	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14 kend	105.000.000	99.428.162	94,69
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	26.202.500	26.202.500	100,00
JUMLAH			396.752.500	390.872.662	98,52

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian program berupa peningkatan kinerja aparatur, indikator masukan yaitu dana total **Rp 30.109.000,00** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp 29.647.915,00** atau 98,47%. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan.

Tabel 2.4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 orang	30.109.000	29.647.915	98,47
JUMLAH			30.109.000	29.647.915	98,47

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Terdiri atas 5 kegiatan dengan indikator capaian program berupa kualitas laporan keuangan dan Penyaluran bantuan keuangan, indikator masukan yaitu dana total **Rp. 297.610.575,00** Dari jumlah

anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp. 294.349.255,00** atau **98,90%**. Pada pelaksanaan program ini, seluruh indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi keuangan pada 5 kegiatan dibawah ini kurang dari 100%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan

No	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Dok	71.579.750	71.186.803	99,45
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	16.695.800	16.555.800	99,16
3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	153.635.025	153.061.077	99,63
4	Penyaluran Bantuan Keuangan SKPKD	100%	46.750.000	44.663.575	95,54
5.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD	1 Dokumen	8.950.000	8.882.000	99,24
JUMLAH			297.610.575	294.349.255	98,90

E. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terdiri atas 41 kegiatan dengan indikator capaian program berupa terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas, indikator masukan yaitu dana total **Rp. 2.872.806.692,00** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp. 2.745.412.921,00** atau **95,57%**. Pada pelaksanaan program ini, 41 kegiatan indikator kinerja keluaran (output) kegiatan dapat mencapai target yang ditetapkan. Realisasi keuangan pada kegiatan – kegiatan dibawah ini kurang dari 100% karena adanya beberapa faktor penyebab di lapangan dan efisiensi dalam penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

No	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penerbitan SPPTPBB dan DHKP	180.000 lbr da 600 buku DHKP	33.850.000	33.365.250	98,57
2	Operasional Pendataan Pajak dan Retribusi	1 dokumen	77.100.000	74.365.000	96,45
3	Persiapan Pelaksanaan Penganggaran E-Budgeting	100%	21.850.000	18.786.500	85,98
4	Penatausahaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	87 dokumen	20.450.000	19.720.000	96,43
5	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja (SP2B) Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	304 dokumen	14.140.000	12.395.500	87,66
6	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja (SP2B) Bantuan Operasional sekolah (BOS)	1804 dokumen	15.150.000	13.000.000	85,81
7	Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	300 dokumen	10.000.000	9.695.000	96,95
8	Penatausahaan Kas Daerah	240 dokumen	30.300.000	28.998.956	95,71
9	Implementasi Aplikasi SIMGAJI ke OPD	91 orang	41.700.000	39.199.441	94,00
10	Pemutakhiran Data Pajak	1 dokumen	123.650.000	119.483.500	96,63
11	Penata Usahaan Gaji dan Tunjangan PNSD	1.572 dokumen dan 92 orang	47.345.000	45.258.862	95,59
12	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Restribusi	2 dokumen	7.900.000	5.741.500	72,68
13	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	1 dokumen	623.000.000	620.420.000	99,59
14	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 dokumen	32.400.000	17.719.000	54,69
15	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	1 dokumen	39.500.000	35.118.750	88,91
16	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 dokumen	46.333.000	42.986.200	92,78
17	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	40.725.000	40.500.750	99,45
18	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen	46.270.200	46.252.275	99,96

19	Penunjang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda)	100%	18.700.000	18.409.150	98,44
20	Penyusunan Laporan Semesteran Aset/ Barang Daerah	1 dokumen	87.100.000	86.198.000	98,96
21	Pelaksanaan Penerbitan SP2D	6.000 dokumen	64.005.000	62.694.029	97,95
22	Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah	10 unit	67.250.000	65.571.800	97,50
23	TP-TGR	1 kali/tahun	10.050.000	9.836.952	75,38
24	Implementasi Simda Barang Milik Daerah	44 OPD	42.550.000	42.067.250	98,87
25	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	44 OPD	62.557.600	50.262.425	80,35
26	Fasilitas Penerbitan DPA dan SPD	4 kali/tahun	20.800.000	18.714.000	89,97
27	Kodefikasi dan Pencekingan Aset	1 dokumen	26.400.000	26.341.250	99,78
28	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD untuk BPK dan bendaharawan	132 orang / 44 OPD	47.142.400	46.032.550	97,65
29	Implementasi Aplikasi Persediaan	44 OPD	16.740.000	16.648.000	99,45
30	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 dokumen	35.700.000	35.610.934	99,75
31	Penyusunan Standar Biaya dan Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD	3 buku	30.500.000	17.551.000	57,54
32	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	15 unit	37.600.000	36.407.000	96,83
33	Sosialisasi PBB dan BPHTB	17 kali	76.817.000	76.817.000	100,00
34	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD	10%	53.800.000	50.602.100	94,06
35	Sosialisasi Cukai Tembakau	1 kali	227.312.517	197.781.000	87,01
36	Operasional Pemungutan PAD	85%	477.000.000	476.958.134	99,99
37	Pengalihan Potensi PAD	100%	21.767.000	20.280.000	93,17
38	Klinik Akuntansi /Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD	44 OPD	12.101.975	12.098.375	99,97
39	Verifikasi Piutang PBB	20%	118.250.000	113.123.414	95,66
40	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	3.000 dokumen	20.250.000	18.749.434	92,59
41	Penatausahaan Belanja Langsung	3.000 dokumen	23.750.000	23.652.640	99,59
	JUMLAH		2.872.806.692	2.745.412.921	95,57

F. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian program berupa terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkualitas, indikator masukan yaitu dana total **Rp. 45.300.000,00** Dari jumlah anggaran tersebut direalisasikan sebesar **Rp. 45.298.000,00** atau 100%. Kegiatan Pengelolaan Dana Transfer, Dana Perimbangan dan Bagi Hasil, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota

No	KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pengelolaan Dana Transfer, Dana Perimbangan dan Bagi Hasil	75 Dokumen	45.300.000	45.298.000	100
	JUMLAH		45.300.000	45.298.000	100

2.1.4 Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018

Untuk melihat Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2018 dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BPKD dan realisasi APBD dapat kita lihat secara terperinci dalam (*tabel 2.1.*):

Tabel 2.8
Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKD Tahun 2018

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
4.04 . 4.04.01. 01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Out Come : Persentase kebutuhan Administrasi perkantoran yg terpenuhi	96,40%	96,40%	96,50%	96,50%	100	96,80%	96,80%	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Out Put: Jumlah Surat yg distribusikan tepat waktu	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Out Put : Jumlah tagihan yg dibayar tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Out Put: Jumlah kendaraan yg memperoleh perpanjangan pajak kendaraan bermotor	1 kl/Tahun	1 kl/Tahun	1 kl/Tahun	1 kl/Tahun	100	1 kl/Tahun	1 kl/Tahun	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Out Put : Jumlah Anggaran untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan.	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	100	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Out Put: a.Jumlah Pengadaan Peralatan dan Bahan kebersihan b. Jumlah Gedung yg memperoleh penyediaan jasa kebersihan bangun	a. 1 Tahun , b. 1 Gedung	1 Tahun , b. 1 Gedung	1 Tahun , b. 1 Gedung	1 Tahun , b. 1 Gedung	100	1 Tahun , b. 1 Gedung	1 Tahun , b. 1 Gedung	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Out Put: Jumlah Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Out Put: Jumlah npaket bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	10 Exsplar	10 Exsplar	10 Exsplar	10 Exsplar	100	10 Exsplar	10 Exsplar	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Out Put: a.Jumlah waktu terlaksananya penyediaan makan dan minum tamu b. jlh waktu terlaksananya penyediaan makan minum rapat	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100

4.04 . 4.04.01 . 01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Out Put: Jumlah waktu tersedianya anggaran rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Derah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100
4.04 . 4.04.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran^)	Out Put: Jumlah Anggaran Pembayaran Tenaga Honorer	12 Bln/ Tahun untuk 18 Org	12 Bln/ Tahun untuk 18 Org	12 Bln/ Tahun untuk 18 Org	12 Bln/ Tahun untuk 18 Org	100	12 Bln/ Tahun	12 Bln/ Tahun	100
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Out Come: Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	96,93%	96,93%	97,20%	97,20%	100	97,50%	97,50%	100
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Out Put: Jumlah Paket peralatan gedung kantor	1 gedung	1 gedung	1 gedung	1 gedung	100	1 gedung	1 gedung	100
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Out Put: Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1 gebung	1 gebung	1 gebung	1 gebung	100	1 gebung	1 gebung	100
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Out Put: a. Jlh mobil memperoleh jasa service b. jlh mobil yg memperoleh suku cadang c. jlh mobil yg memperoleh penyediaan bahan bakar	14 kend	14 kend	14 kend	14 kend	100	14 kend	14 kend	100
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Out Put: Jumlah Perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Out Come: Persentase Meningkatnya kualitas SDM aparatur BPKD	95%	95%	95,50%	95,50%	100	96%	96%	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Out Put: Meningkatnya SDM PNS yang Mengikuti Pelatihan	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100	4 orang	4 orang	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 05.17	Penyusunan Standar Operasional Prosedur BPKD (SOP)	Out Put: Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Out Come: 1. Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah, 2. Persentase Dana Hibah dan Bansos yang Tersalurkan	1. (0 Temuan), 2. (100)	1. (0 Temuan), 2. (100)	1. (0 Temuan), 2. (100)	1. (0 Temuan), 2. (100)	100	1. (0 Temuan), 2. (100)	1. (0 Temuan), 2. (100)	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Out Put: Jumlah dokumen Renstra, Renja, Tapkin, RKA, DPA, Lakip, dan LPPD.	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	100	9 Dok	9 Dok	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Out Put: Jumlah Laporan Keuangan Semesteran.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Out Put: Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 06.05	Penyaluran Bantuan Keuangan SKPKD	Out Put : Persentasi Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 06.05	Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD	Ouput. Jlh Laporan Keuangan SKPKD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase SDM Pengelola Keuangan OPD yang Terlatih, 2. Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat, 3. Persentase OPD dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu, 4. Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD, 5. Persentase Pencapaian Target PAD, 6. Persentase BMD yang tercatat dengan Akurat, 7. Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat, 8. Persentase BMD yang Tertib, 9. Persentase Peningkatan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), 10. APBD Tepat Waktu	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 75%, 5. 76%, 6. 100%, 7. 100%, 8. 30%, 9. 10%, 10. -	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 75%, 5. 76%, 6. 100%, 7. 100%, 8. 30%, 9. 10%, 10. -	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 80%, 5. 82%, 6. 100%, 7. 100%, 8. 40%, 9. 10%, 10. -	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 80%, 5. 82%, 6. 100%, 7. 100%, 8. 40%, 9. 10%, 10. 30 Nov 2020	100	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 90%, 5. 90%, 6. 100%, 7. 100%, 8. 50%, 9. 10%, 10. 30 Nov 2020	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 90%, 5. 90%, 6. 100%, 7. 100%, 8. 50%, 9. 10%, 10. 20 Nov 2021	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 15.35	Penerbitan SPPTPBB dan DHKP	Out Put: jlh Penerbitan SPPT dan DHKP	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	100	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.36	Klinik Akuntansi/ Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Out Put: Jlh Konsultasi OPD dalam Laporan penyusunan Laporan Keuangan	Org/44 OPD	Org/44 OPD	Org/44 OPD	Org/44 OPD	100	Org/44 OPD	Org/44 OPD	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.37	Verifikasi Piutang PBB	Out Put: Persentase Piutang PBB yang Teridentifikasi	20 %	20 %	20 %	20 %	100	20 %	20 %	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.38	Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bos dan JKN	Out Put: 1. Jumlah Rekonsiliasi Pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah, 2. Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana BOS, 3. Jumlah Data Rekonsiliasi Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Nasional, 4. Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Penegsahan Pendapatan dan Belanja Dana JKN Kapitasi	1.4 Dokumen, 2.1.800 dokumen, 3. 4 Dokumen, 4. 300 Dokumen	1.4 Dokumen, 2.1.800 dokumen, 3. 4 Dokumen, 4. 300 Dokumen	1.4 Dokumen, 2.1.800 dokumen, 3. 4 Dokumen, 4. 300 Dokumen	1.4 Dokumen, 2.1.800 dokumen, 3. 4 Dokumen, 4. 300 Dokumen	100	1.4 Dokumen, 2.1.800 dokumen, 3. 4 Dokumen, 4. 300 Dokumen	1.4 Dokumen, 2.1.800 dokumen, 3. 4 Dokumen, 4. 300 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.01	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Out Put: jlh rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 15.02	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Out Put: Jumlah Penyusunan Ramperda tentang APBD.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.03	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Out Put: Jumlah rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran. APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Out Put: Jumlah Penyusunan Ramperda Perubahan APBD.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.05	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Out Put: , Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Out Put: Jlh Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

4.04 . 4.04.01 . 15.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Out Put: Jlh Peraturan KDH Tentang Peretanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01 . 15.10	Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji dan Tunjangan	Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Data Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD, 2. Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil, 3. Jumlah Data Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNSD, 4. Jumlah Data Rekonsiliasi Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil, 5. Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, 6. Jumlah Satuan Kerja (Bendahara) Bimbingan Aplikasi Simgaji, 7. Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan PNSD	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	100	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01 . 15.11	Penunjang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda)^	Out Put: Persentase Kualitas SDM OPD pengelola Sistem Informasi Keuangan Simda	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 15.12	Penyusunan Laporan Semesteran Aset/Barang Daerah^)	Out Put: Terlaksananya Penyusunan Laporan Semesteran.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.14	Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah^)	Out Put: Jumlah Penghapusan dan pelelangan BMD	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.15	TP-TGR^)	Out Put: Jumlah Sidang Majelis TP-TGR.	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	100	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.16	Implementasi Simda Barang Milik Daerah^)	Out Put: Jumlah OPD yang Asetnya Terinputkan ke Simda	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	100	44 OPD	44 OPD	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.17	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah^)	Out Put: Jumlah OPD yang dibina	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	100	44 OPD	44 OPD	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.18	Fasilitasi Penerbitan DPA dan SPD ^)	Out Put: Jlh Penerbitan DPA dan SPD OPD	4 Kali/Tahun	4 Kali/Tahun	4 Kali/Tahun	4 Kali/Tahun	100	4 Kali/Tahun	4 Kali/Tahun	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.19	Kodefikasi dan Pencekingan Aset*)	Out Put: Jlh Dokumen Aset yang tertata	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 15.20	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan OPD dan PPK Bendahara	Out Put: Jumlah Peserta Bimtek Laporan Keuangan	132 Org/44 OPD	132 Org/44 OPD	132 Org/44 OPD	132 Org/44 OPD	100	132 Org/44 OPD	132 Org/44 OPD	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.21	Implementasi Aplikasi Persediaan	Out Put: Jumlah OPD Asetnya terimputkan ke Simda BMD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	44 OPD	100	44 OPD	44 OPD	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.24	Penyusunan Standar Biaya dan buku petunjuk juknis Pelaksanaan APBD	Out Put: Jlh Buku standar biaya dan petunjuk juknis pelaksanaan APBD	3 Buku	3 Buku	3 Buku	3 Buku	100	3 Buku	3 Buku	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.27	Bimbingan Teknis Penyusunan Surat Pertanggungjawab an (SPJ) untuk Bendahara Pengeluaran OPD-OPD	Out Put: Jumlah Peserta Bimtek Laporan Keuangan						132Org/44 OPD	132Org/44 OPD	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.28	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	Out Put: Jlh Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	15 Unit	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.29	Sosialisasi PBB dan BPHTB^)	Out Put: Jumlah Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan	17 Kali	17 Kali	17 Kali	17 Kali	100	17 Kali	17 Kali	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 15.31	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD	Out Put: Persentase Data Objek Pajak yang falid	1	1	1	1	100	1	1	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.32	Sosialisasi cukai tembakau^)	Out Put: Jumlah kegiatan sosialisasi cukai tembakau	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100	1 Kali	1 Kali	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.33	Operasional Pendataan Pajak dan Retribusi	Out Put: Jlh Data Objek Pajak dan Retribusi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.35	Operasional Pemungutan PAD	Out Put: Persentase Realisasi Pemungutan PAD	85%	85%	85%	85%	100	85%	85%	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.36	Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Out Put: Persentase Realisasi Pemungutan PAD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.37	Persiapan dan Pelaksanaan Panggaran E- budgeting	Out Put: Persentase Pelaksanaan anggaran E Budgeting	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.38	Monitoring dan Evaluasi Persiapan dan Pelaksanaan Panggaran E- budgeting	Out Put: Jumlah Dokumen Laporan Monev	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100

4.04 . 4.04.01 . 01 . 15.39	Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP 8%, 2. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP dan Askes Subsidi, 3. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP Taperrum, 4. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP 8%, JKK dan JKN, 5. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP dan Askes Subsidi, 6. Jumlah Data Rekonsiliasi Taperrum	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 6 Dokumen, 5. 8 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 6 Dokumen, 5. 8 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 6 Dokumen, 5. 8 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 6 Dokumen, 5. 8 Dokumen, 6. 1 Dokumen	100	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 6 Dokumen, 5. 8 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 6 Dokumen, 5. 8 Dokumen, 6. 1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15.41	Pengelolaan Kas Daerah	Out Put: Jlh Laporan Penatausahaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15.43	Pemutakhiran Data Pajak	Out Put: Jlh data Pajak yang terinventarisir	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15.45	Penatausahaan Belanja langsung	Out Pu: Jumlah Dokumen Penerbitan dan Pengesahan Belanja (SP2D UP, SP2D TU, SP2D GU, SP2D GU dan TU Nihil, SP2D LS)	4.000 Dokumen	4.000 Dokumen	4.000 Dokumen	4.000 Dokumen	100	4.000 Dokumen	4.000 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15.46	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	Out Put: Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan belanja tidak langsung (Gaji dan Tunjangan PNSD, Gaji dan Tunjangan Ketua dan Anggota DPRD, Alokasi	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen	100	3.000 Dokumen	3.000 Dokumen	100

		Dana Desa dan Dana Nagari, Hibah dan Bantuan Keuangan, Pengembalian Belanja, Non Anggaran, Insentif)								
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.38	Pelaksanaan Penerbitan SP2D	Out Put: Jumlah SP2D yang Diterbitkan	6.000 Dokumen	6.000 Dokumen	6.000 Dokumen	6.000 Dokumen	100			
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.38	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Out Put: Jumlah Rekonsiliasi data pengelolaan keuangan daerah dalam 1 th	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	100			
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.38	Penerbitan Surat penghentian Pembayaran (SKPP)	Out Put: Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP)	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	100			
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.44	Sistem dan Prosedur (Sisdur) Penatausahaan Keuangan Kabupaten	Out Put: Jumlah Dokumen Sisdur Penatausahaan Keuangan Kabupaten						1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.47	Pengadaan Cetak Blok dan Peta ZNT PBB	Out Put: Jumlah Peta yang di cetak						60 Peta	60 Peta	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 15.48	Pemuktahiran Zona Nilai Tanah	Out Put: Jumlah Dokumen ZNT						1 Dokumen	1 Dokumen	100

4.04 . 4.04.01. 01 . 15.49	Intensiifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah	Out Put: Jumlah Dokumen Objek Pajak						1 Dokumen	1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 16	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	Out Come: Persentase Realisasi Terlaksananya Dana Transfer dan Bagi Hasil Dari Pusat	95%	95%	96%	96%	100	96,5%	96,5%	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 16.01	Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Dana DAK Fisik, 2. Jumlah Laporan Realisasi DAK Non Fisik, 3. Jumlah Laporan Realisasi DID, 4. Jumlah Laporan Realisasi DBH, 5. Jumlah Laporan Realisasi Dana Desa, 6. Jumlah Laporan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	100	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01. 01. 17	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan tepat Waktu	30 Nov 2017	30 Nov 2017	30 Nov 2018	30 Nov 2018	100	30 Nov 2019	30 Nov 2019	100
4.04 . 4.04.01. 01 . 17.01	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Out Put: Julah Dokumen KUA dan PPAS setelah perubahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
4.04 . 4.04.01.0 1 . 17.02	Penyusunan KUA dan PPAS	Out Put : Julah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Meskipun sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih baik dalam rangka meniadakan perencanaan pembangunan namun belum lagi optimal.

Melihat kondisi tersebut KPA BPKD Kabupaten Padang Pariaman selaku Pengelola Badan Pengelola Keuangan Daerah mencoba untuk mensinergikan pengelolaan Keuangan melalui :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah pusat maupun daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsisten antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun Capaian Kinerja Pelayanan BPKD sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra BPKD tahun 2016-2021 dapat kita lihat pada (tabel 2.9 terlampir) :

Tabel 2. 9
Pencapaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	Satuan	Target Kinerja						Realisasi Kinerja		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018
Urusan Wajib												
1	Melakukan Perumusan Kebijakan Teknis dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan wewenang yang dimiliki	Jumlah Perda APBD yang ditetapkan pada 1 tahun/ jumlah Perbub APBD ditetapkan dalam 1 tahun	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Penunjang untuk Kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Keuangan Melalui Pelaksana Pendapatan, Pengelola asset Daerah, Pelaksanaan Anggaran dan Pengelolaan Akuntansi dan Perbendaharaan.	Menunjukkan Jumlah Kegiatan Pendapatan Asli Daerah (P A D) serta Menghimpun Aset Aset Daerah.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2. 10
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Renstra

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui Pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material Terhadap Laporan Keuangan Daerah
			Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material Terhadap Pengelolaan BMD
			Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Kenaikan Pajak Daerah

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPKD

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pemerintah dibidang Pengelola keuangan dalam urusan wajib yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok meksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKD mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang Keuangan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keuangan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Keuangan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang Keuangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang urusan Pengelola Keuangan dengan uraian tugas sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 rincian Uraian Tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman disebutkan bahwa :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Laporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
 1. Subbid Pendataan
 2. Subbid Penetapan
 3. Subbid Monev & Pelaporan Pendapatan.
4. Bidang Penagihan
 1. Subbid Pajak Daerah
 2. Subbid Penagihan PBB & BPHTB
 3. Subbid Pendapatan Lainnya
4. Bidang Anggaran terdiri dari :
 1. Subbid Perencanaan Anggaran;
 2. Subbid Pengendalian Anggaran
 3. Subbid SKPKD
5. Bidang Aset terdiri dari :
 1. Subbid Administrasi Aset
 2. Subbid Mutasi Aset
 3. Subbid Pemanfaatan / Pemberdayaan Aset
6. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 1. Subbid Pengelolaan Kas Daerah
 2. Subbid Belanja Langsung
 3. Subbid Belanja Tidak Langsung

7. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 1. Subbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja
 2. Subbid Monev dan Pelaporan
 3. Subbid Pembinaan Keuangan Daerah.

1. KEPALA BPKD

Uraian Tugas Kepala BPKD

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis badan;
 - b. perumusan kebijakan umum bidang Keuangan;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan Keuangan dalam rangka mencapai target kinerja badan;
 - d. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - f. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan;
 - g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
 - h. koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Uraian Tugas Sekretaris BPKD

1. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif

dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Badan serta membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/ daerah di lingkungan Badan;
 - d. pengelolaan urusan ASN;
 - e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - f. koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/ atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ringkasan Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.

2) Sub Bagian Keuangan

Ringkasan Tugas Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Ringkasan Tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan

Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

3. BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Pendapatan dan Penetapan

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah, konsultasi informasi pengawasan dan pengendalian Pendapatan, perumusan kebijakan teknis pendaftaran dan penetapan Pajak Daerah, pelaksanaan pendaftaran wajib pajak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud fungsi : ayat (1), Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai
 - a. penyusunan perencanaan program bidang pendataan dan penetapan.
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
 - c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan bidang pendataan dan penetapan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan urusan Subbid Pendataan dan Subbid Penetapan;
 - e. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbid monev dan pelaporan pendapatan;

- f. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Subbid Pendataan

Ringkasan Tugas Subbid Pendataan

Subbid Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan.

2) Subbid Penetapan

Ringkasan Tugas Subbid Penetapan

Subbid Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan penetapan.

3) Subbid Monev dan Pelaporan Pendapatan

Ringkasan Tugas Subbid Monev dan Pelaporan Pendapatan

Subbid Monev dan Pelaporan Pendapatan mempunyai tugas Meyiapkan Laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.

4. BIDANG PENAGIHAN

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Penagihan

- (1) Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan prosedur penagihan dan keberatan, pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi dan pendapatan daerah lainnya dan pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan kewajiban pajak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program bidang penagihan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang;
- c. koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan Penagihan;
- d. perumusan kebijakan tentang system dan prosedur penagihan dan keberatan;
- e. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
- f. penyelenggaraan kegiatan urusan Subbid pajak daerah;
- g. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbid Penagihan PBB dan BPHTB;
- h. penyusunan pelaporan kinerja Bidang; dan/ atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Subbid Pajak Daerah

Ringkasan Tugas Subbid Pajak Daerah

Subbid Pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah untuk masa pajak berjalan maupun sudah lewat waktu jatuh tempo, pengwasan pajak dan retribusi yang dikelola badan pengelola keuangan daerah.

2) Subbid Penagihan PBB dan BPHTB

Ringkasan Tugas Subbid Penagihan PBB dan BPHTB

Subbid Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas Menyampaikan Surat pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Wajib pajak PBB/BPHTB, menerbitkan surat tagihan PBB/BPHTB dan menerima dan memproses penerbitan surat persetujuan dan /atau penolakan permohonan keberatan pajak.

3) Subbid Pendapatan Lainnya

Ringkasan Tugas Pendapatan Lainnya

Subbid Pendapatan lainnya mempunyai tugas Melaksanakan pendataan dan rencana kerja dalam melaksanakan penagihan pendapatan lainnya dan mengumpulkan bahan dan data serta Informasi tentang pendapatan daerah lainnya.

5. BIDANG ANGGARAN

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Anggaran

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas Menyiapkan konsep perumusan prosedur Penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, penyusunan petunjuk teknis anggaran serta pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan dalam pelaksanaan dana Hibah dan bansos sesuai ketentuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Anggaran;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Anggaran;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan bidang anggaran;
 - d. persiapan konsep perumusan prosedur Penyusunan rancangan APBD
 - e. persiapan konsep perumusan prosedur Penyusunan rancangan Perubahan APBD;
 - f. pengendalian penyusunan Anggaran;
 - g. penyusunan buku petunjuk teknis anggaran
 - h. pengelolaan Dana Hibah dan Bansos serta ketentuan lainnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Subbid Perencanaan Anggaran

Ringkasan Tugas Subbid Perencanaan Anggaran

Subbid Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan Anggaran, melaksanakan verifikasi RKA/RKPA OPD dan DPA /DPPA serta menyiapkan bahan penyusunan DPA/DPPA OPD dan menyiapkan bahan standar harga satuan pokok kegiatan tahunan anggaran berkenaan.

2) Subbid Pengendalian Anggaran

Ringkasan Tugas Subbid Pengendalian Anggaran

Subbid Pengendalian Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan Penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah, menyusun pedoman pelaksanaan APBD, menyusun standar biaya, meneliti DPA-SKPKD dan DPD-OPD serta melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran.

3) Subbid SKPKD

Ringkasan Tugas Subbid SKPKD

Subbid SKPKD mempunyai tugas Mengelola pelaksanaan Anggaran Hibah dan Bansos Daerah, melaksanakan verifikasi data hibah dan bansos serta mengelola dana nagari sesuai ketentuan.

6. BIDANG ASET

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

- (1) Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah, penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah, pemanfaatan pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah serta pemeliharaan penyimpanan penyaluran, perawatan sesuai ketentuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat
- (1) Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan Bidang Aset;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Aset;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan Bidang Aset;
 - d. pelaksanaan kegiatan di bidang Aset;
 - e. persiapan rancangan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
 - f. penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
 - g. pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan barang milik daerah;
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Subbid Administrasi Aset

Ringkasan Tugas Subbid Administrasi Aset

Subbid Administrasi Aset mempunyai tugas Menyiapkan RKBMD dan RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD serta penyusunan standar harga barang sesuai ketentuan.

2) Subbid Mutasi Aset

Ringkasan Tugas Subbid Mutasi Aset

Subbid Mutasi Aset mempunyai tugas Melakukan penatusahaan baran milik daerah serta melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan.

3) Subbid Pemanfaatan /Pemberdayaan Aset

Ringkasan Tugas Subbid Pemanfaatan /Pemberdayaan Aset

Subbid Pemanfaatan/ Pemberdayaan Aset mempunyai tugas Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penyimpanan, perawatan, pemanfaatan, pemindahan barang milik daerah.

7. BIDANG PERBENDAHARAAN

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Perbendaharaan

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas Mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi Belanja dan pembiayaan serta pengelolaan Kas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas ;
 - c. pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - d. pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - e. penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang Perbendaharaan; dan/ atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1) Subbid Pengelolaan Kas Daerah

Ringkasan Tugas Subbid Pengelolaan Kas Daerah

Subbid Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas Meneliti dokumen atau penerimaan uang daerah dan penatausahaan transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah, menyusun anggaran kas, Menyiapkan SPD, Mengevaluasi Pertanggungjawaban pendapatan /penerimaan kas.

2) Subbid Belanja Langsung

Ringkasan Tugas Subbid Belanja Langsung

Subbid Belanja Langsung mempunyai tugas Melaksanakan Registrasi atas SPM dan SP2D belanja Langsung, Meneliti dan memberi pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Non Gaji Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM belanja langsung.

3) Subbid Belanja Tidak Langsung

Ringkasan Tugas Subbid Belanja Tidak Langsung

Subbid Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas Meneliti dan memberi pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan gaji, melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga, meneliti kelengkapan dokumen dan menerbitkan Surat keterangan pemberhentian Pembayaran, Melaksanakan registrasi atas SPM dan SP2D Belanja tidak langsung OPD, meneliti dokumen SPM belanja Tidak Langsung.

8. BIDANG AKUNTANSI

Ringkasan Tugas Kepala Bidang Akuntansi

- (1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas Mengendalikan dan mengkoordinasikan meliputi evaluasi dan pelaporan keuangan serta kebijakna akuntansi dan neraca daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan Prosedur Penatausahaan keuangan Daerah;
 - b. penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pelaksanaan Pembinaan Teknis Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan laporan keuangan; dan/ atau

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1. Subbid Akuntansi Pendapatan & Belanja

Ringkasan Tugas Subbid Akuntansi Pendapatan & Belanja

Subbid Akuntansi Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional, melakukan rasionalisasi laporan pertanggungjawaban fungsional, menyipkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD, Menyusun Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperbup tentang penjabaran Pertanggungjawaban APBD serta menyiapkan bahan penyusunan neraca.

2. Subbid Monev & Pelaporan

Ringkasan Tugas Subbid Monev & Pelaporan

Subbid Monev dan pelaporan mempunyai tugas Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional Dinas badan kantor dan rekonsiliasi, Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada Badan, dinas kantor, menyiapkan bahan dan penyusunan Laporan semesteran dan Prognosis, Melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan BUMD dan BLUDMelaksanakan pengelolaan penyertaan Modal Pemda, menyelesaikan Permasalahan TPTGR dan barang milik daerah, menyiapkan Laporan realisasi Anggaran Neraca, laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih Laporan Arus kas dan laporan lainnya.

3. Subbid Pembinaan Keuangan Daerah

Ringkasan Tugas Subbid Pembinaan Keuangan Daerah

Subbid Pembinaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah, Melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset hampir sama dengan OPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, eselonering maupun jenjang pelatihan penjurangan lainnya.

TABEL 2.11
KOMPOSISI PNS BPKD KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2019

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	9 orang
2	III	27 orang
3	II	9 orang
4	I	-
	Jumlah	45 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) BPKD Tahun 2019

Komposisi pejabat *esselonering* di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh pejabat struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing.

TABEL 2.12
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN ESSELONERING

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	7
3	Eselon IV	21
	Jumlah	29 orang

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) BPKD Tahun 2019

Tabel. 2.13
Daftar Pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman

No.	N A M A	N I P	GOL	ESELON	J A B A T A N	PDDK
1	H. HANIBAL. SE.MM	19610217 198903 1 004	IV/c	II/b	Kepala Badan	S.2

2	TASLIM LETTER. SE. AK	19740715 200212 0 11	IV/a	III/b	Sekretaris	S. I
3	TRIPITA OLINA. SH.MM	19650227 199403 1 004	IV/a	III/b	Kabid Penagihan	S.2
4	NELDA ARLIZA. SE.AK ME	19740921 200312 2 003	III/D	III/b	Kabid Akuntansi	S.2
5	NOVI ARIANI,SE	19621117 198910 2 002	IV/b	III/b	Kabid Perbendaharaan	S.1
6	VALERIO NOVA ST. MSE.MA	19790728 200501 1 004	III/c	III/b	Kabid Anggaran	S.2
7	MARDI.. S..Sos, M. EC .DEV	19720408 199303 1 004	III/d	III/b	Kabid Aset	S.2
8	ARDISON . SE.	19670110 200701 1 007	III/c	III/b	Kabid Pendataan & Penetapan	S.I
9	YURI SANDRITA, SE	198505082010012034	III/b	IV/a	Kasubid Belanja Langsung	S I
10	ASNELLY. A MD	19660915 199308 2 001	III/d	IV/a	Kasubid Belanja Tidak Langsung	D III
11	RONI ABDILAH, SE	19840415 201001 1 029	III/c	IV/a	Kasubid Pengelolaan Kas Daerah	S 1
12	RIVANDI ARIFIN. S.. Sos	19710104 199303 1 002	III/d	IV/a	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S.1
13	EDWARITA. SE	19691202 200501 2 005	III/C	IV/a	Kasubag Keuangan	S.1
14	HENI EMALIA YULISTIANA, SE, M.Si	19840522 201001 2 003	III/b	IV/a	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	S.2
15	FITRAWATI	19690811 199001 2 001	III/c	IV/a	Kasubid Pembinaan Keuangan	SMA
16	SURYA ANGGRAINI. SE	19850909 200902 2 003	III/b	IV/a	Kasubid Akuntansi Pendapatan dan Belanja	S I
17	HERMAN, A.Md	19820316 200501 1 011	III/a	IV/a	Plt.Kasubid Monev dan Pelaporan Keuanagan	S.I
18	NELFA SUSILAWATI.SE. MM	19770329 200804 1 001	III/c	IV/a	Kasubid Pajak Daerah	S.2
19	YONDRI LOEIS, ST.M.Si	19770128 200312 1 001	III/d	IV/a	Kasubid Penagihan dan PBB & BPHTB	S.2
20	HERLINA TRICIA, SE	198308302010012016	III/b	IV /a	Kasubid Pendapatan Lainnya	S I
21	DEDI ANDHIKA, S.Sos	19790506 200902 1 004	III/c	IV/a	Kasubid Pendataan	S.1
22	VIVIAN RUBIANTI, SE	19810501 201102 2 005	III/b	IV/a	Kasubid Monev dan Pelaporan Pendapatan	S.1
23	TRI DEWI ASMRA	19650331 198910 2 001	III/c	IV/a	Kasubid Penetapan	SMA

24	EVI NOVIA . SE	19760525 200604 2 015	III/c	IV/a	Kasubid SKPKD	S.I
25	SONNY EKA PUTRA, SE	19720417 200604 1 004	III/b	IV/a	Kasubid Perencanaan Anggaran	S.I
26	M. NASIR, SE, AK. ME	19770329 200804 1 001	III/c	IV/a	Kasubid Pengendalian Anggaran	S 2
27	RINI ANGGRAINI. SE. AK	19771028 200902 2 001	III/c	IV/a	KasubidAdministrasi Aset	S I
28	DIAN YUHENDRI, ST,M.Eng	19800526 200902 2 001	III/b	IV/a	Kasubid Pemanfaatan / Pemberdayaan Aset	S 2
29	WIRMAN, SE, MPA	19740601 200501 1 008	III/d	IV/a	Kasubid Mutasi Aset	S 2
30	HARLINA, SE. MM	19660425 198602 2 003	IV/a		Staf	S.2
31	BOY ERVANTOS, SE	19860903 201001 1 010	III/a		Staf	S I
32	YULFENDRI, SE	19670730 200801 1 002	III/a		Staf	S I
33	SAPRIL, A. Md	19760420 201001 1 012	II/d		Staf	D III
34	DELFA, SE	19840417 201503 2 004	III/a		Staf	S I
35	MARZAINI, A. Md	19800331 201001 1 013	II/d		Staf	D III
36	MURTA MURNI, A. Md	19800709 201001 2 022	II/d		Staf	D III
37	LIYANE, A. Md	19800709 201001 2 022	II/d		Staf	D III
38	LENI MARDIATY	19710320 199003 2 001	II/c		Staf	SMA
39	WASNITA, S.Sos, MM	19690115 198903 2 003	III/d		Staf	S 2
40	INDRA JAYA KUSUMA, SE	19740605200801 1 004	III/b		Staf	S I
41	ELIANORA, A.Md	19701008 201406 2 003	II/c		Staf	D III
42	YESSI MAISALFIA	19780502 201001 2 002	II/b		Staf	SMA
43	IMELDA	19780522 201310 2 001	II/b		Staf	SMA
44	ROVITA KASTRY ROZA, SE	19931117 201903 2 017	III/a		Staf	SI
45	WINDA TRIMADANI, A.Md	19920308 201903 2 003	II/c		Staf	DIII

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD (Renstra OPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD (RENJA OPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya rencana Kerja BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 disusun dengan mempedomani :

1. RPJPN tahun 2005 – 2025,
2. RPJMN 2014,
3. RPJPD Propinsi Sumbar 2005 – 2025,
4. RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005 – 2025,
5. RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 -2021,

Tabel 2. 14
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
Kabupaten Padang Pariaman

Nama OPD : Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Padang Pariaman

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
4.04.4.04.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKD	Out Come : Persentase kebutuhan Administrasi perkantoran yg terpenuhi	97,20%	1,725,018,700.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BPKD	Out Come : Persentase kebutuhan Administrasi perkantoran yg terpenuhi	97,20%	1,725,018,700.00	
4.04.4.04.1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKD	Out Put: Jumlah Surat yg distribusikan tepat waktu	1 Tahun	299,525,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BPKD	Out Put: Jumlah Surat yg distribusikan tepat waktu	1 Tahun	299,525,000.00	
4.04.4.04.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKD	Out Put : Jumlah tagihan yg dibayar tepat waktu	12 Bulan	198,737,975.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BPKD	Out Put : Jumlah tagihan yg dibayar tepat waktu	12 Bulan	198,737,975.00	
4.04.4.04.1.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKD	Out Put: Jumlah kendaraan yg memperoleh perpanjangan pajak kendaraan bermotor	1 kl/Tahun	15,945,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	BPKD	Out Put: Jumlah kendaraan yg memperoleh perpanjangan pajak kendaraan bermotor	1 kl/Tahun	15,945,000.00	

4.04.4.0 4.1.01.0 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BPKD	Out Put : Jumlah Anggaran untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan.	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	345,000,000.00	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	BPKD	Out Put : Jumlah Anggaran untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan.	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	345,000,000.00
4.04.4.0 4.1.01.0 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPKD	Out Put: a.Jumlah Pengadaan Peralatan dan Bahan kebersihan b. Jumlah Gedung yg memperoleh penyediaan jasa kebersihan bangun	a. 12 Bln / Tahun, b. 1 Gedung	91,430,725.00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	BPKD	Out Put: a.Jumlah Pengadaan Peralatan dan Bahan kebersihan b. Jumlah Gedung yg memperoleh penyediaan jasa kebersihan bangun	a. 12 Bln / Tahun, b. 1 Gedung	91,430,725.00
4.04.4.0 4.1.01.1 2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKD	Out Put: Jumlahenyeddiaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	83,370,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKD	Out Put: Jumlahenyeddiaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	83,370,000.00
4.04.4.0 4.1.01.1 5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPKD	Out Put: Jumlah npaket bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	10 Exsplar	23,860,000.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	BPKD	Out Put: Jumlah npaket bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	10 Exsplar	23,860,000.00
4.04.4.0 4.1.01.1 7	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPKD	Out Put: a. Jumlah waktu terlaksananya penyediaan makan dan minum tamu b. jlh waktuterlaksananya penyediaan makan minum rapat	1 Tahun	48,375,000.00	Penyediaan Makanan dan Minuman	BPKD	Out Put: a. Jumlah waktu terlaksananya penyediaan makan dan minum tamu b. jlh waktuterlaksananya penyediaan makan minum rapat	1 Tahun	48,375,000.00

4.04.4.0 4.1.01.1 8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	BPKD	Out Put: Jumlah waktu tersedianya anggaran rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Derah	1 Tahun	165,375,000.00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	BPKD	Out Put: Jumlah waktu tersedianya anggaran rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Derah	1 Tahun	165,375,000.00
4.04.4.0 4.1.01.1 9	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran^)	BPKD	Out Put: Jumlah Anggaran Pembayaran Tenaga Honorer	12 Bln/ Thn utk 18 Org	453,400,000.00	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran^)	BPKD	Out Put: Jumlah Anggaran Pembayaran Tenaga Honorer	12 Bln/ Thn utk 18 Org	453,400,000.00
4.04 . 4.04.1. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPKD	Out Come: Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	97.50%	844,825,000.00	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BPKD	Out Come: Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	97.50%	844,825,000.00
4.04 . 4.04.1.0 2.05	Pengadaan Operasional Kendaraan Dinas	BPKD	Out Put: Jumlah Kendaraan Kendaraan	1 Unit	294,000,000.00	Pengadaan Operasional Kendaraan Dinas	BPKD	Out Put: Jumlah Kendaraan Kendaraan	1 Unit	294,000,000.00
4.04 . 4.04.1.0 2.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BPKD	Out Put: Jumlah Paket peralatan gedung kantor	1 Gedung	225,500,000.00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	BPKD	Out Put: Jumlah Paket peralatan gedung kantor	1 Gedung	225,500,000.00
4.04 . 4.04.1.0 2.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPKD	Out Put: Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1 Gedung	89,510,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	BPKD	Out Put: Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1 Gedung	89,510,000.00
4.04 . 4.04.1.0 2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKD	Out Put: a. Jumlah mobil memperoleh jasa service b. Jumlah mobil yg memperoleh suku cadang c. Jumlah mobil yg memperoleh penyediaan bahan bakar	14 Kendaraan	138,875,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	BPKD	Out Put: a. Jumlah mobil memperoleh jasa service b. Jumlah mobil yg memperoleh suku cadang c. Jumlah mobil yg memperoleh penyediaan bahan bakar	14 Kendaraan	138,875,000.00

4.04 . 4.04.1.0 2.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	BPKD	Out Put: Jumlah Perlengkapan gedung kantor	1 Unit	96,940,000.00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	BPKD	Out Put: Jumlah Perlengkapan gedung kantor	1 Unit	96,940,000.00
4.04 . 4.04.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPKD	Out Come: Persentae Meningkatnya kualitas SDM aparatur BPKD	96.50%	117,250,000.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BPKD	Out Come: Persentae Meningkatnya kualitas SDM aparatur BPKD	96.50%	117,250,000.00
4.04 . 4.04.1 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKD	Out Put: Meningkatnya SDM PNS yang Mengikuti Pelatihan	4 Orang	70,000,000.00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BPKD	Out Put: Meningkatnya SDM PNS yang Mengikuti Pelatihan	4 Orang	70,000,000.00
4.04 . 4.04.1 . 05 . 17	Penyusunan Standar Operasional Prosedur BPKD (SOP)	BPKD	Out Put: Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Dokumen	47,250,000.00	Penyusunan Standar Operasional Prosedur BPKD (SOP)	BPKD	Out Put: Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	1 Dokumen	47,250,000.00
4.04 . 4.04.1 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BPKD	Out Come: 1. Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah, 2. Persentase Dana Hibah dab Bansos yang Tersalurkan	1. (0 Temuan), 2. (100)	418,920,000.00	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BPKD	Out Come: 1. Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah, 2. Persentase Dana Hibah dab Bansos yang Tersalurkan	1. (0 Temuan), 2. (100)	418,920,000.00
4.04 . 4.04.1.0 6.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKD	Out Put: Jumlah dokumen Renstra, Renja, Tapkin, RKA, DPA, Lakip, dan LPPD.	9 Dok	85,500,000.00	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BPKD	Out Put: Jumlah dokumen Renstra, Renja, Tapkin, RKA, DPA, Lakip, dan LPPD.	9 Dok	85,500,000.00
4.04 . 4.04.1.0 6.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	BPKD	Out Put: Jumlah Laporan Keuangan Semesteran.	1 Dokumen	62,170,000.00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	BPKD	Out Put: Jumlah Laporan Keuangan Semesteran.	1 Dokumen	62,170,000.00

4.04 . 4.04.1.0 6.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BPKD	Out Put: Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 Dokumen	150,000,000.00	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	BPKD	Out Put: Jumlah laporan keuangan yang tersusun	1 Dokumen	150,000,000.00	
4.04 . 4.04.1.0 6.12	Penyaluran Bantuan Keuangan SKPKD	BPKD	Out Put : Persentasi Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	89,250,000.00	Penyaluran Bantuan Keuangan SKPKD	BPKD	Out Put : Persentasi Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	89,250,000.00	
4.04 . 4.04.1.0 6.13	Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD	BPKD	Ouput. Jumlah Laporan Keuangan SKPKD	1 Dokumen	32,000,000.00	Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD	BPKD	Ouput. Jumlah Laporan Keuangan SKPKD	1 Dokumen	32,000,000.00	
4.04.4. 04.1.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	1. Persentase SDM Pengelola Keuangan OPD yang Terlatih, 2.Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat, 3. Persentase OPD dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu, 4. Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD, 5. Persentase Pencapaian Target PAD, 6. Persentase BMD yang tercatat dengan Akurat, 7. Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat, 8. Persentase BMD yang Tertib, 9. Persentase Peningkatan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), 10. APBD Tepat Waktu	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 91%, 5. 92%, 6, 100%, 7. 100%, 8. 55%, 9. 10%, 10. 30 Nov 2020	4,351,422,893. 00	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	1. Persentase SDM Pengelola Keuangan OPD yang Terlatih, 2.Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat, 3. Persentase OPD dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu, 4. Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD, 5. Persentase Pencapaian Target PAD, 6. Persentase BMD yang tercatat dengan Akurat, 7. Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat, 8. Persentase BMD yang Tertib, 9. Persentase Peningkatan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), 10.	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 91%, 5. 92%, 6, 100%, 7. 100%, 8. 55%, 9. 10%, 10. 30 Nov 2020	4,351,422,893.00	

								APBD Tepat Waktu			
4.04 4.04.1. 17.04	Penyusunan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah	BPKD	Out Put: Jumlah Dokumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	0.00	Penyusunan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah	BPKD	Out Put: Jumlah Dokumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Dokumen	0.00	
4.04.4.0 4.1.17.0 5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	BPKD	Out Put: Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah	2 Dokumen	35,000,000.00	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	BPKD	Out Put: Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah	2 Dokumen	35,000,000.00	
4.04.4.0 4.1.17.0 6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	BPKD	Out Put: Jumlah Penyusunan Ranperda tentang APBD.	1 Dokumen	780,000,000.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	BPKD	Out Put: Jumlah Penyusunan Ranperda tentang APBD.	1 Dokumen	780,000,000.00	
4.04.4.0 4.1.17.0 7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	BPKD	Out Put: Jumlah rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran. APBD	1 Dokumen	97,600,000.00	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	BPKD	Out Put: Jumlah rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran. APBD	1 Dokumen	97,600,000.00	
4.04.4.0 4.1.17.0 8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	BPKD	Out Put: Jumlah Penyusunan Ranperda Perubahan APBD.	1 Dokumen	107,625,000.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	BPKD	Out Put: Jumlah Penyusunan Ranperda Perubahan APBD.	1 Dokumen	107,625,000.00	
4.04.4.0 4.1.17.0 9	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKD	Out Put: , Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD.	1 Dokumen	102,375,000.00	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKD	Out Put: , Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD.	1 Dokumen	102,375,000.00	
4.04.4.0 4.1.17.1 0	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKD	Out Put: Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	1 Dokumen	64,537,000.00	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKD	Out Put: Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	1 Dokumen	64,537,000.00	

4.04.4.0 4.1.17.1 1	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKD	Out Put: Jumlah Peraturan KDH Tentang Peretanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	1 Dokumen	55,639,500.00	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKD	Out Put: Jumlah Peraturan KDH Tentang Peretanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	1 Dokumen	55,639,500.00
4.04.4.0 4.1.17.2 4	Penunjang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda)^)	BPKD	Out Put: Persentase Kualitas SDM OPD pengelola Sistem Informasi Keuangan Simda	100%	26,862,150.00	Penunjang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda)^)	BPKD	Out Put: Persentase Kualitas SDM OPD pengelola Sistem Informasi Keuangan Simda	100%	26,862,150.00
4.04.4.0 4.1.17.2 5	Penyusunan Laporan Aset/Barang Daerah^	BPKD	Out Put: Terlaksananya Penyusunan Laporan Aset/Barang Daerah	1 Dokumen	97,125,000.00	Penyusunan Laporan Aset/Barang Daerah^	BPKD	Out Put: Terlaksananya Penyusunan Laporan Aset/Barang Daerah	1 Dokumen	97,125,000.00
4.04.4.0 4.1.17.2 7	Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah^)	BPKD	Out Put: Jumlah Penghapusan dan pelelangan BMD	10 Unit	110,832,750.00	Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah^)	BPKD	Out Put: Jumlah Penghapusan dan pelelangan BMD	10 Unit	110,832,750.00
4.04.4.0 4.1.17.2 8	TP-TGR^)	BPKD	Out Put: Jumlah Sidang Majelis TP-TGR.	1 Kali/Tahun	27,708,450.00	TP-TGR^)	BPKD	Out Put: Jumlah Sidang Majelis TP-TGR.	1 Kali/Tahun	27,708,450.00
4.04.4.0 4.1.17.2 9	Implementasi Simda Barang Milik Daerah^)	BPKD	Out Put: Jumlah OPD yang Asetnya Terinputkan ke Simda	44 OPD	83,500,000.00	Implementasi Simda Barang Milik Daerah^)	BPKD	Out Put: Jumlah OPD yang Asetnya Terinputkan ke Simda	44 OPD	83,500,000.00
4.04.4.0 4.1.17.3 0	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah^)	BPKD	Out Put: Jumlah OPD yang dibina	44 OPD	66,569,149.00	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah^)	BPKD	Out Put: Jumlah OPD yang dibina	44 OPD	66,569,149.00
4.04.4.0 4.1.17.3 1	Fasilitasi Penerbitan DPA dan SPD ^)	BPKD	Out Put: Jumlah Penerbitan DPA dan SPD OPD	4 Kali/Tahun	28,068,394.00	Fasilitasi Penerbitan DPA dan SPD ^)	BPKD	Out Put: Jumlah Penerbitan DPA dan SPD OPD	4 Kali/Tahun	28,068,394.00
4.04.4.0 4.1.17.3 2	Sosialisasi PBB dan BPHTB^)	BPKD	Out Put: Jumlah Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan	17 Kali	120,342,000.00	Sosialisasi PBB dan BPHTB^)	BPKD	Out Put: Jumlah Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan	17 Kali	120,342,000.00

4.04.4.0 4.1.17.3 3	Kodefikasi dan Pencekikan Aset*)	BPKD	Out Put: Jumlah Dokumen Aset yang tertata	1 Dokumen	105,000,000.00	Kodefikasi dan Pencekikan Aset*)	BPKD	Out Put: Jumlah Dokumen Aset yang tertata	1 Dokumen	105,000,000.00
4.04.4.0 4.1.17.3 4	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan PPK Bendahara	BPKD	Out Put: Jumlah Peserta Bimtek Laporan Keuangan	132 Org/44 OPD	204,398,000.00	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan PPK Bendahara	BPKD	Out Put: Jumlah Peserta Bimtek Laporan Keuangan	132 Org/44 OPD	204,398,000.00
4.04.4.0 4.1.17.3 5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD	BPKD	Out Put: Persentase Data Objek Pajak yang Valid	10%	60,600,000.00	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD	BPKD	Out Put: Persentase Data Objek Pajak yang Valid	10%	60,600,000.00
4.04.4.0 4.1.17.3 6	Sosialisasi cukai tembakau^)	BPKD	Out Put: Jumlah kegiatan sosialisasi cukai tembakau	1 Kali	131,775,000.00	Sosialisasi cukai tembakau^)	BPKD	Out Put: Jumlah kegiatan sosialisasi cukai tembakau	1 Kali	131,775,000.00
4.04.4.0 4.1.17.4 0	Implementasi Aplikasi Persediaan	BPKD	Out Put: Jumlah OPD Asetnya terimputkan ke Simda BMD	44 OPD	87,780,000.00	Implementasi Aplikasi Persediaan	BPKD	Out Put: Jumlah OPD Asetnya terimputkan ke Simda BMD	44 OPD	87,780,000.00
4.04.4.0 4.1.17.4 1	Operasional Pemungutan PAD	BPKD	Out Put: Persentase Realisasi Pemungutan PAD	85%	420,000,000.00	Operasional Pemungutan PAD	BPKD	Out Put: Persentase Realisasi Pemungutan PAD	85%	420,000,000.00
4.04.4.0 4.1.17.4 3	Penyusunan Standar Biaya dan buku petunjuk juknis Pelaksanaan APBD	BPKD	Out Put: Jumlah Buku standar biaya dan petunjuk juknis pelaksanaan APBD	3 Buku	46,225,000.00	Penyusunan Standar Biaya dan buku petunjuk juknis Pelaksanaan APBD	BPKD	Out Put: Jumlah Buku standar biaya dan petunjuk juknis pelaksanaan APBD	3 Buku	46,225,000.00
4.04.4.0 4.1.17.4 5	Bimbingan Teknis Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Bendahara Pengeluaran OPD-OPD	BPKD	Out Put: Jumlah Peserta Bimtek Laporan Keuangan	132Org/44 OPD	64,961,000.00	Bimbingan Teknis Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Bendahara Pengeluaran OPD-OPD	BPKD	Out Put: Jumlah Peserta Bimtek Laporan Keuangan	132Org/44 OPD	64,961,000.00

4.04.4.0 4.1.17.4 6	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	BPKD	Out Put: Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	15 Unit	102,817,000.00	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	BPKD	Out Put: Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	15 Unit	102,817,000.00	
4.04.4.0 4.1.17.4 8	Penerbitan SPPTPBB dan DHKP	BPKD	Out Put: Jumlah Penerbitan SPPT dan DHKP	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	74,764,000.00	Penerbitan SPPTPBB dan DHKP	BPKD	Out Put: Jumlah Penerbitan SPPT dan DHKP	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	74,764,000.00	
4.04.4.0 4.1.17.4 9	Klinik Akuntansi/Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	BPKD	Out Put: Jumlah Konsultasi OPD dalam Laporan penyusunan Laporan Keuangan	Org/44 OPD	34,282,500.00	Klinik Akuntansi/Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	BPKD	Out Put: Jumlah Konsultasi OPD dalam Laporan penyusunan Laporan Keuangan	Org/44 OPD	34,282,500.00	
4.04.4.0 4.1.17.5 0	Verifikasi Piutang PBB	BPKD	Out Put: Persentase Piutang PBB yang Teridentifikasi	20%	279,461,000.00	Verifikasi Piutang PBB	BPKD	Out Put: Persentase Piutang PBB yang Teridentifikasi	20%	279,461,000.00	
4.04.4.0 4.1.17.5 1	Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	BPKD	Out Put: 1. Jumlah SP2B Dana BOS, 2. Jumlah SP2B Dana BLUD	1. 1.800 Dokumen, 2. 300 Dokumen	60,000,000.00	Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	BPKD	Out Put: 1. Jumlah SP2B Dana BOS, 2. Jumlah SP2B Dana BLUD	1. 1.800 Dokumen, 2. 300 Dokumen	60,000,000.00	
4.04.4.0 4.1.17.5 2	Penatausahaan Gaji dan Tunjangan PNSD	BPKD	Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Data Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD, 2. Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil 3. Jumlah Data Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNSD, 4. Jumlah Data Rekonsiliasi Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil, 5. Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Penghentian	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	176,000,000.00	Penatausahaan Gaji dan Tunjangan PNSD	BPKD	Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Data Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD, 2. Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil 3. Jumlah Data Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNSD, 4. Jumlah Data Rekonsiliasi Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil, 5. Jumlah Penerbitan Surat Keterangan	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	176,000,000.00	

			Pembayaran, 6. Jumlah Satuan Kerja (Bendahara) Bimbingan Aplikasi Simgaji, 7. Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan PNSD					Penghentian Pembayaran, 6. Jumlah Satuan Kerja (Bendahara) Bimbingan Aplikasi Simgaji, 7. Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan PNSD			
4.04.4.0 4.1.17.5 3	Operasional Pendataan Pajak dan Retribusi	BPKD	Out Put: Jumlah Data Objek Pajak dan Retribusi	1 Dokumen	105,800,000.00	Operasional Pendataan Pajak dan Retribusi	BPKD	Out Put: Jumlah Data Objek Pajak dan Retribusi	1 Dokumen	105,800,000.00	
4.04.4.0 4.1.17.5 4	Persiapan dan Pelaksanaan Penganggaran E-budgeting	BPKD	Out Put: Persentase Pelaksanaan Anggaran E Budgeting	100%	51,765,000.00	Persiapan dan Pelaksanaan Penganggaran E-budgeting	BPKD	Out Put: Persentase Pelaksanaan Anggaran E Budgeting	100%	51,765,000.00	
4.04.4.0 4.1.17.5 6	Penatausahaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKD	Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP 8 %, 2. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP dan Askes Subsidi, 3. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP Taperrum, 4. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran JKK danJKM, 5. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP 8%, JKK dan JK M, 6. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP dan Askes Subsidi , 7. Jumlah Data Rekonsiliasi Taperrum	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 12 Dokumen, 5. 6 Dokumen, 6. 8 Dokumen, 7. 1 Dokumen	58,280,000.00	Penatausahaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	BPKD	Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP 8 %, 2. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP dan Askes Subsidi, 3. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP Taperrum, 4. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran JKK danJKM, 5. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP 8%, JKK dan JK M, 6. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP dan Askes Subsidi , 7. Jumlah Data Rekonsiliasi	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 12 Dokumen, 5. 6 Dokumen, 6. 8 Dokumen, 7. 1 Dokumen	58,280,000.00	

								Taperrum			
4.04.4.0 4.1.17.5 7	Pengelolaan Kas Daerah	BPKD	Out Put: Jumlah Data Rekonsiliasi Kas Daerah	12 Dokumen	47,880,000.00	Pengelolaan Kas Daerah	BPKD	Out Put: Jumlah Data Rekonsiliasi Kas Daerah	12 Dokumen	47,880,000.00	
4.04.4.0 4.1.17.5 8	Pemutakhiran Data Pajak	BPKD	Out Put: Jlh data Pajak yang terinventarisir	1 Dokumen	149,100,000.00	Pemutakhiran Data Pajak	BPKD	Out Put: Jlh data Pajak yang terinventarisir	1 Dokumen	149,100,000.00	
4.04.4.0 4.1.17.5 9	Penatausahaan Belanja langsung	BPKD	Out Pu: Jumlah Dokumen Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung (SP2D UP, SP2D TU, SP2D GU, SP2D GU dan TU Nihil, SP2D LS)	4.000 Dokumen	47,250,000.00	Penatausahaan Belanja langsung	BPKD	Out Pu: Jumlah Dokumen Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung (SP2D UP, SP2D TU, SP2D GU, SP2D GU dan TU Nihil, SP2D LS)	4.000 Dokumen	47,250,000.00	
4.04.4.0 4.1.17.6 0	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	BPKD	Out Put: Jumlah dokumen Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNSD, Gaji dan Tunjangan Ketua dan Anggota DPRD, Alokasi Dana Desa dan Dana Nagari, Hibah dan Bantuan Keuangan, Pengembalian Belanja, Non Anggaran, Insentif)	3.000 Dokumen	72,000,000.00	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	BPKD	Out Put: Jumlah dokumen Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNSD, Gaji dan Tunjangan Ketua dan Anggota DPRD, Alokasi Dana Desa dan Dana Nagari, Hibah dan Bantuan Keuangan, Pengembalian Belanja, Non Anggaran, Insentif)	3.000 Dokumen	72,000,000.00	
4.04.4.0 4.1.17.6 1	Pengadaan Cetak Blok dan Peta ZNT PBB	BPKD	Out Put: Jumlah Peta yang di cetak	60 Peta	0.00	Pengadaan Cetak Blok dan Peta ZNT PBB	BPKD	Out Put: Jumlah Peta yang di cetak	60 Peta	0.00	
4.04.4.0 4.1.17.6 3	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah	BPKD	Out Put: Jumlah Dokumen Objek Pajak	1 Dokumen	167,500,000.00	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah	BPKD	Out Put: Jumlah Dokumen Objek Pajak	1 Dokumen	167,500,000.00	

4.04.4.04.1.18	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	BPKD	Out Come: Persentase Realisasi Terlaksananya Dana Transfer dan Bagi Hasil dari Pusat	97.00%	126,525,000.00	0	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	BPKD	Out Come: Persentase Realisasi Terlaksananya Dana Transfer dan Bagi Hasil dari Pusat	97.00%	126,525,000.000
4.04.4.04.1.18.06	Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	BPKD	Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Dana DAK Fisik, 2. Jumlah Laporan Realisasi DAK Non Fisik, 3. Jumlah Laporan Realisasi DID, 4. Jumlah Laporan Realisasi DBH, 5. Jumlah Laporan Realisasi Dana Desa, 6. Jumlah Laporan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	126,525,000.00		Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	BPKD	Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Dana DAK Fisik, 2. Jumlah Laporan Realisasi DAK Non Fisik, 3. Jumlah Laporan Realisasi DID, 4. Jumlah Laporan Realisasi DBH, 5. Jumlah Laporan Realisasi Dana Desa, 6. Jumlah Laporan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	126,525,000.00
4.03.4.04.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BPKD	Perencanaan Tepat Waktu	30-Nov-20	190,000,000.00		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BPKD	Perencanaan Tepat Waktu	30-Nov-20	190,000,000.00
4.03.4.04.1.21.14	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	BPKD	Out Put: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS setelah perubahan	2 Dokumen	95,000,000.00		Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	BPKD	Out Put: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS setelah perubahan	2 Dokumen	95,000,000.00
4.03.4.04.1.21.15	Penyusunan KUA dan PPAS	BPKD	Out Put : Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	95,000,000.00		Penyusunan KUA dan PPAS	BPKD	Out Put : Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	95,000,000.00
J U M L A H					7,773,961,593					7,773,961,593	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2017 – 2021, maka tema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai:

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional
2. Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energy terbarukan biomas.
3. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara
4. Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2016-2021 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui:

1. pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin;
2. penyediaan infrastruktur wilayah;
3. peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Dalam penyusunan Renja BPKD Tahun telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan

daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja BPKD Tahun apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1

Matrik Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMN 2014-2020
dengan Visi dan Misi Padang Pariaman Tahun 2016-2021

Visi Misi RPJMN Tahun 2014-2020	Visi Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	Visi Misi RPJMD Kab. Padang Pariaman Tahun 2016-2021
Visi :	Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera	Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman yang baru,religius,cerdas dan sejahtera
1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1 Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis,agaman, beradat, dan budaya, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,	1 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan Falsafah Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah
2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	2 Meningkatkan tata pemerintah yang baik, bersih, dan profesional,	2 Meningkatkan perekonomian Kabuapten Padang pariaman melalui daya dukung sektor primer dan jasa
3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	3 meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkeadilan, dan berkualitas tinggi,	3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil melalui peningkatan kesehatan, sarana prasarana kualitas tenaga pendidik
4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	4 Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan budaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	4 Meningkatkan potensi daya saing daerah melalui pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penata ruang dan pengelolaan lingkungan
5 Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	5 Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	5 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan
6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.		6 Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan Publik
7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.		7 Mewujudkan ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan kesiapan sarana dan prasarana yang ramah bencana

TABEL 3.2
KETERKAITAN ANTARA VISI DAN MISI RPJMN 2014-2020
DENGAN VISI MISI PADANG PARIAMAN TAHUN 2016-2021

VISI RPJMN TAHUN 2014-2020		VISI MISI RPJPD KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2005-2025	
Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong		Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas	
MISI RPJMN TAHUN 2014-2020		MISI RPJPD TAHUN 2005-2025	
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasis nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.		

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Rencana Kerja (Renja) BPKD Kabupaten Padang Pariaman Tahun tidak lepas dari pencapaian visi BPKD Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKD Kabupaten Padang Pariaman 2016-2021 yakni **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Profesional dan Prima dalam Pelayanan”**.

Sedangkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 karena tahun merupakan tahun ketiga dari periode pertama pelaksanaan RPJMD (Tahun 2016-2021) sesuai dengan pentahapan dalam RPJPD Kab Tahun 2005-2025, jadi untuk menyusun perencanaan kita mengacu pada Pepres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2016-2021. Untuk itu sejalan dengan itu sebagaimana

yang dituangkan dalam Rancangan RKPD Tahun maka prioritas pembangunan adalah:

1. *Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan* dengan arah kebijakan melalui peningkatan jumlah kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. peningkatan, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan, meningkatnya populasi ternak, peningkatan kawasan konservasi dan budidaya perikanan, pembinaan dan peningkatan teknologi petanian serta peningkatan kapasitas penyuluh
2. *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Iptek* dengan arah kebijakan melalui peningkatan kualifikasi guru, pengembangan pendidik non formal, meningkatnya akses pendidikan dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan, meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
3. *Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* dengan arah kebijakan melalui pengembangan diklat aparatur, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas laporan keuangan, meningkatnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan, peningkatan kualitas musrenbang, fasilitasi dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah.
4. *Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha serta pengembangan pariwisata Daerah secara terpadu* dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan investasi dan kejelasan regulasi, peningkatan sarana dan prasarana objek wisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, menata dan mengelola

kawasan wisata kuliner serta menata dan mengelola kawasan wisata religi.

5. *Peningkatan Pengamalan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat* dengan arah kebijakan melalui peningkatan wirid dan pengajian, meningkatkan insentif guru TPA/MDA, gharin, imam dan khatib, meningkatkan kapasitas lembaga adat dan budaya.
6. *Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pelaku UMKM dan Koperasi* dengan arah kebijakan melalui pengembangan produk olahan dan pemasaran bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan koperasi,
7. *Penurunan Tingkat Kemiskinan secara terintegrasi* dengan arah kebijakan melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, anak jalanan, anak terlantar, mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. meningkatnya sarana dan prasarana pada daerah tertinggal dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin serta penanganan kemiskinan secara terpadu antar OPD.
8. *Peningkatan Pembangunan berbasis mitigasi bencana* dengan arah kebijakan melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pencegahan bahaya kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam
9. *Peningkatan pembangunan Infrastruktur penunjang ekonomi yang ramah Lingkungan* dengan arah kebijakan melalui pembangunan kantor pemerintahan di kawasan ibukota kabupaten, pembangunan,

peningkatan dan rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan, penyediaan fasilitas dan pemeliharaan prasarana perhubungan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah, peningkatan pembangunan dan pengelolaan irigasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk penunjang ekonomi masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk menyusun perencanaan dalam Renja BPKD tahun sesuai dengan prioritas yang ke tiga yaitu *Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* maka tujuan dan Sasaran Rencana BPKD Tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Matrik Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah	0
		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Jumlah Temuan BPK yang Material Terhadap Pengelolaan BMD	0
		Meningkatnya Pajak Daerah	Presentase Kenaikan Pajak Daerah	9,10%

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan aparatur
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana
3. Memberikan pelayanan yang Prima terhadap OPD-OPD.

4. Mengotimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi
5. Mewujudkan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan keuangan
6. Meningkatkan pendapatan asli daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin OPD, pada tahun 2020 BPKD menyelenggarakan 1 (SATU) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, yaitu Urusan Keuangan , yang secara keseluruhan meliputi 7 program dan 73 kegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 7.773.961.593,00.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah, Secara umum, program dan kegiatan BPKD Tahun 2020 adalah sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun dan Prakiraan Maju Tahun berikut :

Tabel 3.4

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

URUSAN : KEUANGAN (FUNGSI PENUNJANG)
OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA LANGSUNG				7.773.961.593.00				8.162.677.892.00
4.04.4.04.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Out Come : Persentase kebutuhan Administrasi perkantoran yg terpenuhi		97.20%	1,725,018,700.00			97.50%	1,816,017,401.00
4.04.4.04.1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Out Put: Jumlah Surat yg distribusikan tepat waktu	BPKD	1 Tahun	299,525,000.00	APBD		1 Tahun	322,651,250.00
4.04.4.04.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Out Put : Jumlah tagihan yg dibayar tepat waktu	BPKD	12 Bulan	198,737,975.00	APBD		12 Bulan	206,574,873.00
4.04.4.04.1.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Out Put: Jumlah kendaraan yg memperoleh perpanjangan pajak kendaraan bermotor	BPKD	1 kl/Tahun	15,945,000.00	APBD		1 kl/Tahun	18,872,250.00

4.04.4.04.1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Out Put : Jumlah Anggaran untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan.	BPKD	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	345,000,000.00	APBD		12 bln / Tahun untuk 42 Orang	350,000,000.00
4.04.4.04.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Out Put: a.Jumlah Pengadaan Peralatan dan Bahan kebersihan b. Jumlah Gedung yg memperoleh penyediaan jasa kebersihan bangunan	BPKD	a. 12 Bln / Tahun, b. 1 Gedung	91,430,725.00	APBD		a. 12 Bln / Tahun, b. 1 Gedung	96,001,841.00
4.04.4.04.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Out Put: Jumlah Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKD	1 Tahun	83,370,000.00	APBD		1 Tahun	87,538,500.00
4.04.4.04.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Out Put: Jumlah npaket bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	BPKD	10 Exsplar	23,860,000.00	APBD		10 Exsplar	28,553,000.00
4.04.4.04.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Out Put: a. Jumlah waktu terlaksananya penyediaan makan dan minum tamu b. jlh waktu terlaksananya penyediaan makan minum rapat	BPKD	1 Tahun	48,375,000.00	APBD		1 Tahun	53,333,437.00
4.04.4.04.1.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Out Put: Jumlah waktu tersedianya anggaran rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Derah	BPKD	1 Tahun	165,375,000.00	APBD		1 Tahun	183,643,750.00
4.04.4.04.1.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran^)	Out Put: Jumlah Anggaran Pembayaran Tenaga Honorer	BPKD	12 Bln/ Thn utk 18 Org	453,400,000.00	APBD		12 Bln/ Thn utk 18 Org	468,848,500.00

4.04 . 4.04.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Out Come: Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	BPKD	97.50%	844,825,000.00	APBD		97.50%	880,291,250.00
4.04 . 4.04.1.02.05	Pengadaan Operasional Kendaraan Dinas	Out Put: Jumlah Kendaraan Kendaraan	BPKD	1 Unit	294,000,000.00	APBD		1 Unit	308,700,000.00
4.04 . 4.04.1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Out Put: Jumlah Paket peralatan gedung kantor	BPKD	1 Gedung	225,500,000.00	APBD		1 gedung	230,850,000.00
4.04 . 4.04.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Out Put: Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	BPKD	1 Gedung	89,510,000.00	APBD		1 gebung	92,985,500.00
4.04 . 4.04.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Out Put: a. Jumlah mobil memperoleh jasa service b. Jumlah mobil yg memperoleh suku cadang c. Jumlah mobil yg memperoleh penyediaan bahan bakar	BPKD	14 Kendaraan	138,875,000.00	APBD		14 kend	140,568,750.00
4.04 . 4.04.1.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Out Put: Jumlah Perlengkapan gedung kantor	BPKD	1 Tahun	96,940,000.00	APBD		1 Tahun	107,187,000.00
4.04 . 4.04.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Out Come: Persentase Meningkatnya kualitas SDM aparatur BPKD	BPKD	96.50%	117,250,000.00	APBD		97.50%	142,612,500.00
4.04 . 4.04.1 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Out Put: Meningkatnya SDM PNS yang Mengikuti Pelatihan	BPKD	4 Orang	70,000,000.00	APBD		4 orang	85,000,000.00
4.04 . 4.04.1 . 05 . 17	Penyusunan Standar Operasional Prosedur BPKD (SOP)	Out Put: Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	BPKD	1 Dokumen	47,250,000.00	APBD		1 Dokumen	57,612,500.00

4.04 . 4.04.1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Out Come: 1. Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah, 2. Persentase Dana Hibah dan Bansos yang Tersalurkan	BPKD	1. (0 Temuan), 2. (100)	418,920,000.00	APBD		1. (0 Temuan), 2. (100)	453,741,000.00
4.04 . 4.04.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Out Put: Jumlah dokumen Renstra, Renja, Tapkin, RKA, DPA, Lakip, dan LPPD.	BPKD	9 Dok	85,500,000.00	APBD		9 Dok	88,200,000.00
4.04 . 4.04.1.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Out Put: Jumlah Laporan Keuangan Semesteran.	BPKD	1 Dokumen	62,170,000.00	APBD		1 Dokumen	69,028,500.00
4.04 . 4.04.1.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Out Put: Jumlah laporan keuangan yang tersusun	BPKD	1 Dokumen	150,000,000.00	APBD		1 Dokumen	167,800,000.00
4.04 . 4.04.1.06.12	Penyaluran Bantuan Keuangan SKPKD	Out Put : Persentasi Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKD	100%	89,250,000.00	APBD		100%	93,712,500.00
4.04 . 4.04.1.06.13	Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD	Ouput. Jumlah Laporan Keuangan SKPKD	BPKD	1 Dokumen	32,000,000.00	APBD		1 Dokumen	35,000,000.00

4.04.4.04.1.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase SDM Pengelola Keuangan OPD yang Terlatih, 2. Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat, 3. Persentase OPD dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu, 4. Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD, 5. Persentase Pencapaian Target PAD, 6. Persentase BMD yang tercatat dengan Akurat, 7. Persentase BMD yang dimanfaatkan dengan tepat, 8. Persentase BMD yang Tertib, 9. Persentase Peningkatan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), 10. APBD Tepat Waktu	BPKD	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 91%, 5. 92%, 6. 100%, 7. 100%, 8. 55%, 9. 10%, 10. 30 Nov 2019	4,351,422,893.00	APBD		1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 91%, 5. 92%, 6. 100%, 7. 100%, 8. 55%, 9. 10%, 10. 30 Nov 2019	4,541,164,491.00
4.04.4.04.1.17.04	Penyusunan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah	Out Put: Jumlah Dokumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	1 Dokumen	0.00	APBD		1 Dokumen	0.00
4.04.4.04.1.17.05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Out Put: Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah	BPKD	2 Dokumen	35,000,000.00	APBD		2 Dokumen	37,000,000.00
4.04.4.04.1.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Out Put: Jumlah Penyusunan Ranperda tentang APBD.	BPKD	1 Dokumen	780,000,000.00	APBD		1 Dokumen	800,000,000.00

4.04.4.04.1.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Out Put: Jumlah rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran. APBD	BPKD	1 Dokumen	97,600,000.00	APBD		1 Dokumen	107,604,000.00
4.04.4.04.1.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Out Put: Jumlah Penyusunan Ranperda Perubahan APBD.	BPKD	1 Dokumen	107,625,000.00	APBD		1 Dokumen	113,006,250.00
4.04.4.04.1.17.09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Out Put: , Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD.	BPKD	1 Dokumen	102,375,000.00	APBD		1 Dokumen	107,493,750.00
4.04.4.04.1.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Out Put: Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	BPKD	1 Dokumen	64,537,000.00	APBD		1 Dokumen	67,764,000.00
4.04.4.04.1.17.11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Out Put: Jumlah Peraturan KDH Tentang Peretanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	BPKD	1 Dokumen	55,639,500.00	APBD		1 Dokumen	58,421,475.00
4.04.4.04.1.17.24	Penunjang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda)^)	Out Put: Persentase Kualitas SDM OPD pengelola Sistem Informasi Keuangan Simda	BPKD	100%	26,862,150.00	APBD		100%	34,205,257.00
4.04.4.04.1.17.25	Penyusunan Laporan Aset/Barang Daerah^	Out Put: Terlaksananya Penyusunan Laporan Aset/Barang Daerah	BPKD	1 Dokumen	97,125,000.00	APBD		1 Dokumen	101,981,250.00
4.04.4.04.1.17.27	Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah^)	Out Put: Jumlah Penghapusan dan pelelangan BMD	BPKD	10 Unit	110,832,750.00	APBD		10 Unit	113,374,387.00
4.04.4.04.1.17.28	TP-TGR^)	Out Put: Jumlah Sidang Majelis TP-TGR.	BPKD	1 Kali/Tahun	27,708,450.00	APBD		1 Kali/Tahun	29,093,872.00
4.04.4.04.1.17.29	Implementasi Simda Barang Milik Daerah^)	Out Put: Jumlah OPD yang Asetnya Terinputkan ke Simda	BPKD	44 OPD	83,500,000.00	APBD		44 OPD	85,000,000.00

4.04.4.04.1.17.30	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah^)	Out Put: Jumlah OPD yang dibina	BPKD	44 OPD	66,569,149.00	APBD		44 OPD	69,897,000.00
4.04.4.04.1.17.31	Fasilitasi Penerbitan DPA dan SPD ^)	Out Put: Jumlah Penerbitan DPA dan SPD OPD	BPKD	4 Kali/Tahun	28,068,394.00	APBD		4 Kali/Tahun	29,417,000.00
4.04.4.04.1.17.32	Sosialisasi PBB dan BPHTB^)	Out Put: Jumlah Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan	BPKD	17 Kali	120,342,000.00	APBD		17 Kali	126,359,000.00
4.04.4.04.1.17.33	Kodefikasi dan Pengecekan Aset*)	Out Put: Jumlah Dokumen Aset yang tertata	BPKD	1 Dokumen	105,000,000.00	APBD		1 Dokumen	107,000,000.00
4.04.4.04.1.17.34	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan PPK Bendahara	Out Put: Jumlah Peserta Bimtek Laporan Keuangan	BPKD	132 Org/44 OPD	204,398,000.00	APBD		132 Org/44 OPD	206,617,000.00
4.04.4.04.1.17.35	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD	Out Put: Persentase Data Objek Pajak yang Valid	BPKD	10%	60,600,000.00	APBD		10%	66,000,000.00
4.04.4.04.1.17.36	Sosialisasi cukai tembakau^)	Out Put: Jumlah kegiatan sosialisasi cukai tembakau	BPKD	1 Kali	131,775,000.00	APBD		1 Kali	138,363,000.00
4.04.4.04.1.17.40	Implementasi Aplikasi Persediaan	Out Put: Jumlah OPD Asetnya terimputkan ke Simda BMD	BPKD	44 OPD	87,780,000.00	APBD		44 OPD	92,169,000.00
4.04.4.04.1.17.41	Operasional Pemungutan PAD	Out Put: Persentase Realisasi Pemungutan PAD	BPKD	85%	420,000,000.00	APBD		85%	441,000,000.00
4.04.4.04.1.17.43	Penyusunan Standar Biaya dan buku petunjuk juknis Pelaksanaan APBD	Out Put: Jumlah Buku standar biaya dan petunjuk juknis pelaksanaan APBD	BPKD	3 Buku	46,225,000.00	APBD		3 Buku	48,036,250.00
4.04.4.04.1.17.45	Bimbingan Teknis Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Bendahara Pengeluaran OPD-OPD	Out Put: Jumlah Peserta Bimtek Laporan Keuangan	BPKD	132Org/44 OPD	64,961,000.00	APBD		132Org/44 OPD	68,209,000.00
4.04.4.04.1.17.46	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	Out Put: Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	BPKD	15 Unit	102,817,000.00	APBD		15 Unit	107,958,000.00

4.04.4.04.1.17.48	Penerbitan SPPTPBB dan DHKP	Out Put: Jumlah Penerbitan SPPT dan DHKP	BPKD	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	74,764,000.00	APBD		180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	78,502,000.00
4.04.4.04.1.17.49	Klinik Akuntansi/ Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Out Put: Jumlah Konsultasi OPD dalam Laporan penyusunan Laporan Keuangan	BPKD	Org/44 OPD	34,282,500.00	APBD		Org/44 OPD	35,996,000.00
4.04.4.04.1.17.50	Verifikasi Piutang PBB	Out Put: Persentase Piutang PBB yang Teridentifikasi	BPKD	20%	279,461,000.00	APBD		20%	283,434,000.00
4.04.4.04.1.17.51	Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Out Put: 1. Jumlah SP2B Dana BOS, 2. Jumlah SP2B Dana BLUD	BPKD	1. 1.800 Dokumen, 2. 300 Dokumen	60,000,000.00	APBD		1. 1.800 Dokumen, 2. 300 Dokumen	65,000,000.00
4.04.4.04.1.17.52	Penatausahaan Gaji dan Tunjangan PNSD	Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Data Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD, 2. Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil 3. Jumlah Data Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNSD, 4. Jumlah Data Rekonsiliasi Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil, 5. Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, 6. Jumlah Satuan Kerja (Bendahara) Bimbingan Aplikasi Simgaji, 7. Jumlah Daftar Gaji dan	BPKD	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	176,000,000.00	APBD		1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	182,000,000.00

		Tunjangan PNSD							
4.04.4.04.1.17.53	Operasional Pendataan Pajak dan Retribusi	Out Put: Jumlah Data Objek Pajak dan Retribusi	BPKD	1 Dokumen	105,800,000.00	APBD		1 Dokumen	120,000,000.00
4.04.4.04.1.17.54	Persiapan dan Pelaksanaan Penganggaran E-budgeting	Out Put: Persentase Pelaksanaan Anggaran E Budgeting	BPKD	100%	51,765,000.00	APBD		100%	54,353,000.00
4.04.4.04.1.17.56	Penatausahaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP 8 %, 2. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP dan Askes Subsidi, 3. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP Taperrum, 4. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran JKK danJKM, 5. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP 8%, JKK dan JKM, 6. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP dan Askes Subsidi , 7. Jumlah Data Rekonsiliasi Taperrum	BPKD	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 12 Dokumen, 5. 6 Dokumen, 6. 8 Dokumen, 7. 1 Dokumen	58,280,000.00	APBD		1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 12 Dokumen, 5. 6 Dokumen, 6. 8 Dokumen, 7. 1 Dokumen	59,094,000.00
4.04.4.04.1.17.57	Pengelolaan Kas Daerah	Out Put: Jumlah Data Rekonsiliasi Kas Daerah	BPKD	12 Dokumen	47,880,000.00	APBD		12 Dokumen	50,274,000.00
4.04.4.04.1.17.58	Pemutakhiran Data Pajak	Out Put: Jlh data Pajak yang terinventarisir	BPKD	1 Dokumen	149,100,000.00	APBD		1 Dokumen	156,555,000.00

4.04.4.04.1.17.59	Penatausahaan Belanja langsung	Out Pu: Jumlah Dokumen Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung (SP2D UP, SP2D TU, SP2D GU, SP2D GU dan TU Nihil, SP2D LS)	BPKD	4.000 Dokumen	47,250,000.00	APBD		4.000 Dokumen	49,612,000.00
4.04.4.04.1.17.60	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung	Out Put: Jumlah dokumen Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNSD, Gaji dan Tunjangan Ketua dan Anggota DPRD, Alokasi Dana Desa dan Dana Nagari, Hibah dan Bantuan Keuangan, Pengembalian Belanja, Non Anggaran, Insentif)	BPKD	3.000 Dokumen	72,000,000.00	APBD		3.000 Dokumen	75,000,000.00
4.04.4.04.1.17.61	Pengadaan Cetak Blok dan Peta ZNT PBB	Out Put: Jumlah Peta yang di cetak	BPKD	60 Peta	0.00	APBD		60 Peta	0.00
4.04.4.04.1.17.63	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah	Out Put: Jumlah Dokumen Objek Pajak	BPKD	1 Dokumen	167,500,000.00	APBD		1 Dokumen	175,375,000.00
4.04.4.04.1.18	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Out Come: Persentase Realisasi Terlaksananya Dana Transfer dan Bagi Hasil dari Pusat	BPKD	97.00%	126,525,000.000	APBD		98.00%	132,851,250.000

4.04.4.04.1.18.06	Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Dana DAK Fisik, 2. Jumlah Laporan Realisasi DAK Non Fisik, 3. Jumlah Laporan Realisasi DID, 4. Jumlah Laporan Realisasi DBH, 5. Jumlah Laporan Realisasi Dana Desa, 6. Jumlah Laporan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi	BPKD	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	126,525,000.00	APBD		1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	132,851,250.00
4.03.4.04.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Tepat Waktu	BPKD	30-Nov-20	190,000,000.00			30-Nov-21	196,000,000.00
4.03.4.04.1.21.14	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Out Put: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS setelah perubahan	BPKD	2 Dokumen	95,000,000.00	APBD		2 Dokumen	98,000,000.00
4.03.4.04.1.21.15	Penyusunan KUA dan PPAS	Out Put : Jumlah dokumen KUA dan PPAS	BPKD	2 Dokumen	95,000,000.00	APBD		2 Dokumen	98,000,000.00
J U M L A H					7,773,961,593.00				8,162,677,892.00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program- program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan OPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Parit Malintang, 2019
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

H. HANIBAL, SE, MM
NIP.196102171989031004

URUSAN
OPD

: KEUANGAN (FUNGSI PENUNJANG)
: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAEI

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
1	2
	BELANJA
	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	BELANJA LANGSUNG
4.04.4.04.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.04.4.04.1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.04.4.04.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.04.4.04.1.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4.04.4.04.1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.04.4.04.1.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.04.4.04.1.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.04.4.04.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4.04.4.04.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman
4.04.4.04.1.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
4.04.4.04.1.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran ^{^)}
4.04 . 4.04.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.04 . 4.04.1.02.05	Pengadaan Operasional Kendaraan Dinas
4.04 . 4.04.1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4.04 . 4.04.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.04 . 4.04.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4.04 . 4.04.1.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4.04 . 4.04.1 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.04 . 4.04.1 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4.04 . 4.04.1 . 05 . 17	Penyusunan Standar Operasional Prosedur BPKD (SOP)

4.04 . 4.04.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.04 . 4.04.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.04 . 4.04.1.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
4.04 . 4.04.1.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.04 . 4.04.1.06.12	Penyaluran Bantuan Keuangan SKPKD
4.04 . 4.04.1.06.13	Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD
4.04.4.04.1.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4.04 .4.04.1.17.04	Penyusunan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah
4.04.4.04.1.17.05	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
4.04.4.04.1.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
4.04.4.04.1.17.07	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
4.04.4.04.1.17.08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
4.04.4.04.1.17.09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD
4.04.4.04.1.17.10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4.04.4.04.1.17.11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
4.04.4.04.1.17.24	Penunjang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda)^)
4.04.4.04.1.17.25	Penyusunan Laporan Aset/Barang Daerah^)
4.04.4.04.1.17.27	Penghapusan dan Pelelangan Barang Milik Daerah^)
4.04.4.04.1.17.28	TP-TGR^)
4.04.4.04.1.17.29	Implementasi Simda Barang Milik Daerah^)
4.04.4.04.1.17.30	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah^)
4.04.4.04.1.17.31	Fasilitasi Penerbitan DPA dan SPD ^)
4.04.4.04.1.17.32	Sosialisasi PBB dan BPHTB^)
4.04.4.04.1.17.33	Kodefikasi dan Pencekingan Aset*)
4.04.4.04.1.17.34	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan PPK Bendahara
4.04.4.04.1.17.35	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAD

4.04.4.04.1.17.36	Sosialisasi cukai tembakau [^])
4.04.4.04.1.17.40	Implementasi Aplikasi Persediaan
4.04.4.04.1.17.41	Operasional Pemungutan PAD
4.04.4.04.1.17.43	Penyusunan Standar Biaya dan buku petunjuk juknis Pelaksanaan APBD
4.04.4.04.1.17.45	Bimbingan Teknis Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk Bendahara Pengeluaran OPD-OPD
4.04.4.04.1.17.46	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset
4.04.4.04.1.17.48	Penerbitan SPPTPBB dan DHKP
4.04.4.04.1.17.49	Klinik Akuntansi/ Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.04.4.04.1.17.50	Verifikasi Piutang PBB
4.04.4.04.1.17.51	Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Nasional (IKN)
4.04.4.04.1.17.52	Penatausahaan Gaji dan Tunjangan PNSD
4.04.4.04.1.17.53	Operasional Pendataan Pajak dan Retribusi
4.04.4.04.1.17.54	Persiapan dan Pelaksanaan Penganggaran E-budgeting
4.04.4.04.1.17.56	Penatausahaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
4.04.4.04.1.17.57	Pengelolaan Kas Daerah
4.04.4.04.1.17.58	Pemutakhiran Data Pajak
4.04.4.04.1.17.59	Penatausahaan Belanja langsung
4.04.4.04.1.17.60	Penatausahaan Belanja Tidak Langsung
4.04.4.04.1.17.61	Pengadaan Cetak Blok dan Peta ZNT PBB
4.04.4.04.1.17.63	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah

4.04.4.04.1.18	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
4.04.4.04.1.18.06	Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer
4.03.4.04.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4.03.4.04.1.21.14	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
4.03.4.04.1.21.15	Penyusunan KUA dan PPAS

Tabel 3. 3

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

RAH

Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020		
	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3	4	5	6
			7,773,961,593.00
Out Come : Persentase kebutuhan		96.80%	1,725,018,700.00
Administrasi perkantoran yg terpenuhi			
Out Put: Jumlah Surat yg distribusikan tepat waktu	BPKD	1 Tahun	299,525,000.00
Out Put : Jumlah tagihan yg dibayar tepat waktu	BPKD	12 Bulan	198,737,975.00
Out Put: Jumlah kendaraan yg memperoleh perpanjangan pajak kendaraan bermotor	BPKD	1 kl/Tahun	15,945,000.00
Out Put : Jumlah Anggaran untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan.	BPKD	12 bln / Tahun untuk 42 Orang	345,000,000.00
Out Put: a.Jumlah Pengadaan Peralatan dan Bahan kebersihan b. Jumlah Gedung yg memperoleh penyediaan jasa kebersihan bangunan	BPKD	a. 12 Bln / Tahun, b. 1 Gedung	91,430,725.00
Out Put: Jumlah Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKD	1 Tahun	83,370,000.00
Out Put: Jumlah npaket bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	BPKD	10 Exsplar	23,860,000.00
Out Put: a. Jumlah waktu terlaksananya penyediaan makan dan minum tamu b. jlh waktu terlaksananya penyediaan makan minum rapat	BPKD	1 Tahun	48,375,000.00
Out Put: Jumlah waktu tersedianya anggaran rapat2 koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah	BPKD	1 Tahun	165,375,000.00
Out Put: Jumlah Anggaran Pembayaran Tenaga Honorer	BPKD	12 Bln/ Thn utk 18 Org	453,400,000.00
Out Come: Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	BPKD	97.50%	844,825,000.00
Out Put: Jumlah Kendaraan Kendaraan	BPKD	1 Unit	294,000,000.00
Out Put: Jumlah Paket peralatan gedung kantor	BPKD	1 Gedung	225,500,000.00
Out Put: Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	BPKD	1 Gedung	89,510,000.00
Out Put: a. Jumlah mobil memperoleh jasa service b. Jumlah mobil yg memperoleh suku cadang c. Jumlah mobil yg memperoleh penyediaan bahan bakar	BPKD	14 Kendaraan	138,875,000.00
Out Put: Jumlah Perlengkapan gedung kantor	BPKD	1 Tahun	96,940,000.00
Out Come: Persentase Meningkatnya kualitas SDM aparatur BPKD	BPKD	96.00%	117,250,000.00
Out Put: Meningkatnya SDM PNS yang Mengikuti Pelatihan	BPKD	4 Orang	70,000,000.00
Out Put: Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	BPKD	1 Dokumen	47,250,000.00

Out Come: 1. Jumlah Temuan BPK yang Material terhadap Laporan Keuangan Daerah, 2. Persentase Dana Hibah dab Bansos yang Tersalurkan	BPKD	1. (0 Temuan), 2. (100)	418,920,000.00
Out Put: Jumlah dokumen Renstra, Renja, Tapkin, RKA, DPA, Lakip, dan LPPD.	BPKD	9 Dok	85,500,000.00
Out Put: Jumlah Laporan Keuangan Semesteran.	BPKD	1 Dokumen	62,170,000.00
Out Put: Jumlah laporan keuangan yang tersusun	BPKD	1 Dokumen	150,000,000.00
Out Put : Persentasi Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan	BPKD	100%	89,250,000.00
Ouput. Jumlah Laporan Keuangan SKPKD	BPKD	1 Dokumen	32,000,000.00
1. Persentase SDM Pengelola Keuangan OPD yang Terlatih, 2. Persentase Pengelolaan Kas Daerah yang Akurat, 3. Persentase OPD dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu, 4. Persentase Ketersediaan Data Objek dan Subjek PAD, 5. Persentase Pencapaian Target PAD, 6. Persentase BMD yang tercatat dengan Akurat, 7. Persentase BMD yang termanfaatkan dengan tepat, 8. Persentase BMD yang Tertib, 9. Persentase Peningkatan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), 10. APBD Tepat	BPKD	1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 91%, 5. 92%, 6, 100%, 7. 100%, 8. 55%, 9. 10%, 10. 30 Nov 2019	4,351,422,893.00
Out Put: Jumlah Dokumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD	1 Dokumen	0.00
Out Put: Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah	BPKD	2 Dokumen	35,000,000.00
Out Put: Jumlah Penyusunan Ranperda tentang APBD.	BPKD	1 Dokumen	780,000,000.00
Out Put: Jumlah rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran. APBD	BPKD	1 Dokumen	97,600,000.00
Out Put: Jumlah Penyusunan Ranperda Perubahan APBD.	BPKD	1 Dokumen	107,625,000.00
Out Put: , Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD.	BPKD	1 Dokumen	102,375,000.00
Out Put: Jumlah Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	BPKD	1 Dokumen	64,537,000.00
Out Put: Jumlah Peraturan KDH Tentang Peretanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	BPKD	1 Dokumen	55,639,500.00
Out Put: Persentase Kualitas SDM OPD pengelola Sistem Informasi Keuangan Simda	BPKD	100%	26,862,150.00
Out Put: Terlaksananya Penyusunan Laporan Aset/Barang Daerah	BPKD	1 Dokumen	97,125,000.00
Out Put: Jumlah Penghapusan dan pelelangan BMD	BPKD	10 Unit	110,832,750.00
Out Put: Jumlah Sidang Majelis TP-TGR.	BPKD	1 Kali/Tahun	27,708,450.00
Out Put: Jumlah OPD yang Asetnya Terinputkan ke Simda	BPKD	44 OPD	83,500,000.00
Out Put: Jumlah OPD yang dibina	BPKD	44 OPD	66,569,149.00
Out Put: Jumlah Penerbitan DPA dan SPD OPD	BPKD	4 Kali/Tahun	28,068,394.00
Out Put: Jumlah Kegiatan Sosialisasi di Kecamatan	BPKD	17 Kali	120,342,000.00
Out Put: Jumlah Dokumen Aset yang tertata	BPKD	1 Dokumen	105,000,000.00
Out Put: Jumlah Peserta Bimtek Laporan Keuangan	BPKD	132 Org/44 OPD	204,398,000.00
Out Put: Persentase Data Objek Pajak yang Valid	BPKD	10%	60,600,000.00

Out Put: Jumlah kegiatan sosialisasi cukai tembakau	BPKD	1 Kali	131,775,000.00
Out Put: Jumlah OPD Asetnya terimputkan ke Simda BMD	BPKD	44 OPD	87,780,000.00
Out Put: Persentase Realisasi Pemungutan PAD	BPKD	85%	420,000,000.00
Out Put: Jumlah Buku standar biaya dan petunjuk juknis pelaksanaan APBD	BPKD	3 Buku	46,225,000.00
Out Put: Jumlah Peserta Bimtek Laporan Keuangan	BPKD	132Org/44 OPD	64,961,000.00
Out Put: Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan Aset	BPKD	15 Unit	102,817,000.00
Out Put: Jumlah Penerbitan SPPT dan DHKP	BPKD	180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHKP	74,764,000.00
Out Put: Jumlah Konsultasi OPD dalam Laporan penyusunan Laporan Keuangan	BPKD	Org/44 OPD	34,282,500.00
Out Put: Persentase Piutang PBB yang Teridentifikasi	BPKD	20%	279,461,000.00
Out Put: 1. Jumlah SP2B Dana BOS, 2. Jumlah SP2B Dana BLUD	BPKD	1. 1.800 Dokumen, 2. 300 Dokumen	60,000,000.00
Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Data Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNSD, 2. Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil 3. Jumlah Data Rekonsiliasi Gaji dan Tunjangan PNSD, 4. Jumlah Data Rekonsiliasi Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil, 5. Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, 6. Jumlah Satuan Kerja (Bendahara) Bimbingan Aplikasi Simgaji, 7. Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan PNSD	BPKD	1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	176,000,000.00
Out Put: Jumlah Data Objek Pajak dan Retribusi	BPKD	1 Dokumen	105,800,000.00
Out Put: Persentase Pelaksanaan Anggaran E Budgeting	BPKD	100%	51,765,000.00
Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP 8 %, 2. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP dan Askes Subsidi, 3. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran IWP Taperrum, 4. Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran JKK danJKM, 5. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP 8%, JKK dan JKM, 6. Jumlah Data Rekonsiliasi IWP dan Askes Subsidi , 7. Jumlah	BPKD	1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 12 Dokumen, 5. 6 Dokumen, 6. 8 Dokumen, 7. 1 Dokumen	58,280,000.00
Out Put: Jumlah Data Rekonsiliasi Kas Daerah	BPKD	12 Dokumen	47,880,000.00
Out Put: Jlh data Pajak yang terinventarisir	BPKD	1 Dokumen	149,100,000.00
Out Pu: Jumlah Dokumen Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung (SP2D UP, SP2D TU, SP2D GU, SP2D GU dan TU Nihil. SP2D LS)	BPKD	4.000 Dokumen	47,250,000.00
Out Put: Jumlah dokumen Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNSD, Gaji dan Tunjangan Ketua dan Anggota DPRD, Alokasi Dana Desa dan Dana Nagari, Hibah dan Bantuan Keuangan, Pengembalian Belanja Non Anggaran Insentif)	BPKD	3.000 Dokumen	72,000,000.00
Out Put: Jumlah Peta yang di cetak	BPKD	60 Peta	0.00
Out Put: Jumlah Dokumen Objek Pajak	BPKD	1 Dokumen	167,500,000.00

Out Come: Persentase Realisasi Terlaksananya Dana Transfer dan Bagi Hasil dari Pusat	BPKD	96.50%	126,525,000.000
Out Put: 1. Jumlah Laporan Realisasi Dana DAK Fisik, 2. Jumlah Laporan Realisasi DAK Non Fisik, 3. Jumlah Laporan Realisasi DID, 4. Jumlah Laporan Realisasi DBH, 5. Jumlah Laporan Realisasi Dana Desa, 6. Jumlah Laporan Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi	BPKD	1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	126,525,000.00
Perencanaan tepat Waktu	BPKD	4 Dokumen	190,000,000.00
Out Put: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS setelah perubahan	BPKD	2 Dokumen	95,000,000.00
Out Put : Jumlah dokumen KUA dan PPAS	BPKD	2 Dokumen	95,000,000.00

**Parit Malintang,
Kepala Badan Pengelola Keuangan
Kabupaten Padang Pariaman**

**H. HANIBAL, SE.
NIP. 19610217 198903**

Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Ket
		Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
7	8	9	10	11
			8,162,677,892.00	
		96.80%	1,816,017,401.00	
APBD		1 Tahun	322,651,250.00	
APBD		12 Bulan	206,574,873.00	
APBD		1 kl/Tahun	18,872,250.00	
APBD		12 bln / Tahun untuk 42 Orang	350,000,000.00	
APBD		a. 12 Bln / Tahun, b. 1 Gedung	96,001,841.00	
APBD		1 Tahun	87,538,500.00	
APBD		10 Exsplar	28,553,000.00	
APBD		1 Tahun	53,333,437.00	
APBD		1 Tahun	183,643,750.00	
APBD		12 Bln/ Thn utk 18 Org	468,848,500.00	
APBD		97.50%	880,291,250.00	
APBD		1 Unit	308,700,000.00	
APBD		1 gedung	230,850,000.00	
APBD		1 gebung	92,985,500.00	
APBD		14 kend	140,568,750.00	
APBD		1 Tahun	107,187,000.00	
APBD		96.00%	142,612,500.00	
APBD		4 orang	85,000,000.00	
APBD		1 Dokumen	57,612,500.00	

APBD		1. (0 Temuan), 2. (100)	453,741,000.00	
APBD		9 Dok	88,200,000.00	
APBD		1 Dokumen	69,028,500.00	
APBD		1 Dokumen	167,800,000.00	
APBD		100%	93,712,500.00	
APBD		1 Dokumen	35,000,000.00	
APBD		1. 100%, 2. 100%, 3. 100%, 4. 91%, 5. 92%, 6, 100%, 7. 100%, 8. 55%, 9. 10%, 10. 30 Nov 2019	4,541,164,491.00	
APBD		1 Dokumen	0.00	
APBD		2 Dokumen	37,000,000.00	
APBD		1 Dokumen	800,000,000.00	
APBD		1 Dokumen	107,604,000.00	
APBD		1 Dokumen	113,006,250.00	
APBD		1 Dokumen	107,493,750.00	
APBD		1 Dokumen	67,764,000.00	
APBD		1 Dokumen	58,421,475.00	
APBD		100%	34,205,257.00	
APBD		1 Dokumen	101,981,250.00	
APBD		10 Unit	113,374,387.00	
APBD		1 Kali/Tahun	29,093,872.00	
APBD		44 OPD	85,000,000.00	
APBD		44 OPD	69,897,000.00	
APBD		4 Kali/Tahun	29,417,000.00	
APBD		17 Kali	126,359,000.00	
APBD		1 Dokumen	107,000,000.00	
APBD		132 Org/44 OPD	206,617,000.00	
APBD		10%	66,000,000.00	

APBD		1 Kali	138,363,000.00	
APBD		44 OPD	92,169,000.00	
APBD		85%	441,000,000.00	
APBD		3 Buku	48,036,250.00	
APBD		132Org/44 OPD	68,209,000.00	
APBD		15 Unit	107,958,000.00	
APBD		180.000 lbr SPPT dan 600 buku DHPK	78,502,000.00	
APBD		Org/44 OPD	35,996,000.00	
APBD		20%	283,434,000.00	
APBD		1. 1.800 Dokumen, 2. 300 Dokumen	65,000,000.00	
APBD		1. 72 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 2 Dokumen, 4. 2 Dokumen, 5. 200 Dokumen, 6. 92 Bendahara, 7. 1.288 Dokumen	182,000,000.00	
APBD		1 Dokumen	120,000,000.00	
APBD		100%	54,353,000.00	
APBD		1. 36 Dokumen, 2. 24 Dokumen, 3. 12 Dokumen, 4. 12 Dokumen, 5. 6 Dokumen, 6. 8 Dokumen, 7. 1 Dokumen	59,094,000.00	
APBD		12 Dokumen	50,274,000.00	
APBD		1 Dokumen	156,555,000.00	
APBD		4.000 Dokumen	49,612,000.00	
APBD		3.000 Dokumen	75,000,000.00	
APBD		60 Peta	0.00	
APBD		1 Dokumen	175,375,000.00	

APBD		96.50%	132,851,250.000	
APBD		1. 33 Dokumen, 2. 8 Dokumen, 3. 1 Dokumen, 4. 1 Dokumen, 5. 2 Dokumen, 6. 1 Dokumen	132,851,250.00	
		4 Dokumen	196,000,000.00	
APBD		2 Dokumen	98,000,000.00	
APBD		2 Dokumen	98,000,000.00	

2019
angan Daerah
riaman

MM
3 1 004